

657 092  
wid  
5 CI

**STUDI EMPIRIS FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI  
AKUNTAN PUBLIK**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi



Diajukan Oleh  
Nama : WIDODO  
NIM : C4C001177

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

**IPT-PUSTAK-UNDIP**

Tesis Berjudul

**STUDI EMPIRIS FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI  
AKUNTAN PUBLIK**

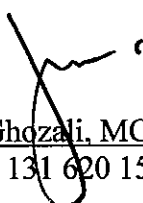
Yang disiapkan dan disusun oleh  
**WIDODO**

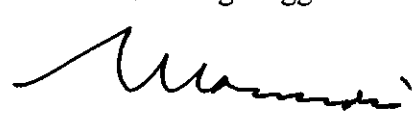
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 April 2004  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing Utama


Pembimbing Anggota

  
Dr. Imam Ghozali, MCom, Akt  
NIP. 131 620 152

  
Dr. Mohamad Nasir, MSi, Akt  
NIP. 131 875 458

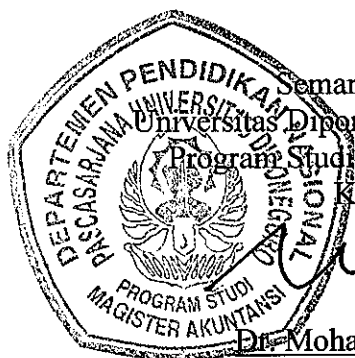
Anggota Tim Penguji

  
Drs. Rahardja, MSi, Akt  
NIP. 130 808 804

  
Dr. FX. Sugiyanto, MS  
NIP. 131 620 151

  
Drs. Agus Purwanto, MSi, Akt

NIP. 131 991 447



Semarang, 10 Juni 2004

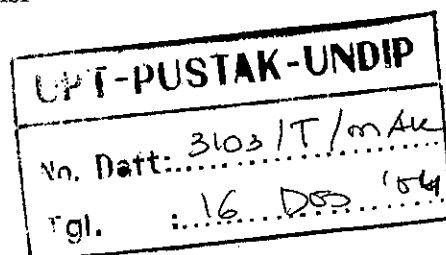
Universitas Diponegoro Program Pascasarjana

Program Studi Magister Sains Akuntansi

Ketua Program

  
Dr. Mohamad Nasir, MSi, Akt

NIP. 131 875 458



## ABSTRACTION

Independency represent attitude which is not impressionable by other party as well as is unbiased of importance of whoever. To be confessed as a behaving is independent, public accountant have to free from each;every head intervention and owner of company. Public accountant nor only having the character of objective and unbiased but must also avoid situation causing the loss of trust of society of its attitude. Inferential that trust of society to public accountant independency represent very important matter and have big meaning itself public accountant. Credibility public accountant this time is progressively questioned, because often digress from SPAP representing reference to run its duty. In this case public accountant is also assessed disingenuous and act to side at importance of client, or in this case public accountant not yet owned independency, objectivity and good enough integrity. Problem of this research is, factors what influencing public accountant independency.

Population in this research is user audit service, user of audit service limited at Managing Director or small and middle Director Company'S finance in Indonesia which is its financial statement of book year per 31 December 2001 and per December 2002 have been made an audit of by public accountant office in Jakarta representing company proxy in metropolis and in Central Java as company proxy outside metropolis. Election of user of audit service made an audit of by accountant office as responder of dala this research is based that they can assess and know public accountant office performance, because public accountant do inspection to its financial statement. Sampel which is taken in this research a number of 100 responder. Analyzer the used is analysis of double regression.

This research is compiled as effort to do examination to problem of research. accepted of raised hypothesis from result of solution and analysis of developed to be problems to be obtained by support which is signifikan strengthening concept that, monetary tying, service besides the audit, the duration audit relation, emulation between KAP, size measure of KAP, audit fee and social relation to independency. Result of from this research is monetary tying, service besides the audit, the duration audit relation, emulation between KAP, size measure of KAP and audit fee and social relation have an effect on negativity to public accountant independency. While conditions to fulfill classic assumptions all is up to standard.

Keyword : Public accountant and independency

## ABSTRAKSI

Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan juga tidak memihak kepentingan siapapun. Untuk diakui sebagai seorang yang bersikap independen, akuntan publik harus bebas dari setiap intereferensi pimpinan dan pemilik perusahaan. Akuntan publik juga tidak hanya bersifat obyektif dan tidak memihak tetapi harus pula menghindari keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap independensi akuntan publik merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai arti yang besar pada akuntan publik itu sendiri. Kredibilitas akuntan publik sekarang ini semakin dipertanyakan, karena sering dianggap menyimpang dari SPAP yang merupakan acuan untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal ini akuntan publik juga dinilai tidak jujur dan bertindak memihak pada kepentingan klien, atau dalam hal ini akuntan publik belum memiliki independensi, obyektifitas dan integritas yang memadai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi independensi akuntan publik.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemakai jasa audit, pemakai jasa audit dibatasi pada Direktur Utama atau Direktur Keuangan perusahaan menengah dan kecil di Indonesia yang laporan keuangannya tahun buku per 31 Desember 2001 dan per desember 2002 telah diaudit oleh kantor akuntan publik di Jakarta yang merupakan wakil perusahaan di kota besar dan di Jawa Tengah sebagai wakil perusahaan diluar kota besar. Pemilihan pemakai jasa audit yang diaudit oleh kantor akuntan sebagai responden dalam penelitian ini didasarkan bahwa mereka mampu menilai dan mengetahui kinerja kantor akuntan publik, karena akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya Sampel yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 100 responden. Alat analisis yang digunakan adalah *analisis regresi berganda*.

Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk melakukan pengujian terhadap masalah penelitian. Dengan diterimanya hipotesis yang diajukan dari hasil analisis dan pembahasan atas permasalahan yang dikembangkan diperoleh dukungan yang signifikan yang memperkuat konsep bahwa, ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP, *audit fee* dan hubungan sosial terhadap independensi. Hasil dari penelitian ini adalah ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik. Sedangkan syarat-syarat untuk memenuhi asumsi-asumsi klasik semua memenuhi syarat.

Kata kunci : Akuntan publik dan independensi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Telaah Putaka.....	10
2.1.1 Pengertian Profesi.....	10
2.1.2 Kode Etik Profesi.....	12
2.1.3 Independensi.....	15
2.1.4 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Independensi.....	19
2.1.4.1 Ikatan Kepentingan Dan Hubungannya Dengan Klien.....	19
2.1.4.2 Pemberian Jasa lain Selain Jasa Audit.....	21
2.1.4.3 Lamanya Hubungan Audit Dengan Klien	23
2.1.4.3 Persaingan Antar kantor Akuntan Publik	23
2.1.4.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik.....	24
2.1.4. 5 Audit Fee.....	25
2.1.4.6 Hubungan Sosial.....	27
2.1.5 Pemantauan IAI Terhadap Independensi Anggota	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Hipotesis.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Dan Sumber Data.....	36
3.2. Populasi dan Sampel.....	36
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4. Definisi Operasional.....	38
3.5. Tehnik Analisis Data.....	43

BAB IV.	ANALISIS DATA	
4.1.	Pengumpulan Data.....	49
4.2.	Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	50
4.3.	Uji Reliabilitas Dan Validitas Data.....	54
4.4.	Uji Respon Bias.....	57
4.5.	Analisis Data.....	58
4.5.1	Pengujian Asumsi Klasik.....	58
4.5.1.1	Uji Normalitas Data.....	59
4.5.1.2	Uji Multikolinearitas.....	60
4.5.1.2	Uji Heteroskedastisits.....	61
4.6	Uji Hipotesis.....	63
4.6.1	Uji F Test.....	63
4.6.2.	Koofisien Determinasi.....	64
4.6.3	Pengujian Hipotesis.....	65
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan.....	77
5.2.	Kesimpulan Setiap Hipotesis.....	79
5.3.	Kesimpulam Mengenai masalah Penelitian.....	80
5.4.	Implikasi Manajerial.....	82
5.5.	Keterbatasan.....	83
5.6.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN 1 Uji Reliabilitas dan Validitas.....		86
LAMPIRAN 2 Uji Respon Bias.....		94
LAMPIRAN 3 Uji Analisis Regresi.....		96
LAMPIRAN 4 Uji Data Penelitian.....		105
LAMPIRAN 5 Uji Angket penelitian.....		113

## DAFTAR TABEL

			Halaman
1	Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
2	Tabel 4.1.	Jumlah Sampel Dan Tingkat Pengembalian.....	50
3	Tabel 4.2	Data Deskriptif Demografi Responden.....	51
4	Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	53
5	Tabel 4.4	Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas Dan Validitas.....	56
6	Tabel 4.5	Hasil uji Respon Bias.....	57
7	Tabel 4.6	Nilai VIF.....	61
8	Tabel 4.7	Hasil Uji F.....	63
9	Tabel 4.8	Ringkasan Hasil Regresi.....	66
10	Tabel 4.9	Kesimpulan Hasil pengujian Hipotesis Penelitian	71
11	Tabel 4.10	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	72

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
2. Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas Data.....	59
3. Gambar 4.2 <i>Grafik Scatterplot Plot Of Regression Standadized Predicted Value Dengan Standadized Residual</i> .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Lampiran Uji Reliabilitas dan Validitas..... 86
Lampiran 2	Lampiran Uji Respon Bias..... 94
Lampiran 3	Lampiran Uji Analisis Regresi..... 96
Lampiran 4	Lampiran Data Penelitian..... 105
Lampiran 5	Lampiran Angket Penelitian..... 114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Dunia usaha di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang tidak menggembirakan disebabkan oleh krisis ekonomi dunia dan berbagai faktor dalam negeri seperti perkembangan politik dan penegakan supremasi hukum. Dengan kondisi tersebut pemerintah tetap memberikan keleluasaan kepada swasta untuk mengembangkan usaha lewat berbagai kebijakan agar dunia usaha di Indonesia dapat bersaing untuk menghadapi pasar bebas dimasa mendatang. Salah satu implikasi dari perkembangan dunia usaha adalah kebutuhan akan informasi yaitu informasi laporan keuangan yang relevan, akurat, dapat dipercaya, sehingga investor dapat melihat peluang bisnis yang masih menguntungkan. Untuk menjamin pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, maka perlu pihak independen untuk melakukan audit. Dalam hal ini peran akuntan publik sebagai pihak yang memeriksa dan memberikan pendapat professional atas informasi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.

Akuntan publik merupakan profesi yang dapat memberikan jasa audit atas laporan keuangan yang dibuat manajemen. Melalui pemberian jasa audit ini akuntan publik dapat membantu manajemen maupun pihak luar sebagai pemakai laporan

keuangan untuk menentukan secara obyektif dapat dipercaya tidaknya laporan keuangan perusahaan. Profesi akuntan publik juga dapat mempercayai pihak luar perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menilai dapat dipercaya tidaknya laporan keuangan yang dibuat manajemen, sehingga akuntan publik merupakan suatu profesi kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga mendukung dimana akuntan publik dipercaya sebagai auditor melalui kesepakatan Ikatan Akuntan Indonesia dan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KMK 011/1996. Dalam keputusan tersebut pemerintah memberi kepercayaan kepada akuntan publik untuk melakukan aktivitas jasa berupa jasa audit umum, jasa audit khusus, pemberian bantuan konsultasi, dan mewakili ke luar dalam bidang yang berhubungan dengan akuntansi. Sedangkan auditor sebagai pihak yang dipercaya dituntut memenuhi standar umum yang disepakati dan ditetapkan oleh organisasi profesi.

Profesi akuntan publik merupakan jabatan kepercayaan masyarakat umum, maka akuntan publik dituntut harus tidak boleh memihak kepada siapapun (independen), harus bersifat obyektif dan jujur seperti yang dinyatakan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), dalam standar umum ke 2 : sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan auditor (IAI, SPAP, 2001 : 220). Independensi merupakan aspek yang unik dan penting dari profesi akuntan publik, karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi penilaian (akreditasi) atas laporan keuangan. Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan juga tidak memihak kepentingan siapapun. Sudibyo (1993: 67) untuk bersikap independen

akuntan publik secara intelektual senantiasa berpikir jujur. Untuk diakui sebagai seorang yang bersikap independen, akuntan publik harus bebas dari setiap intereferensi pimpinan dan pemilik perusahaan. Akuntan publik juga tidak hanya bersifat obyektif dan tidak memihak tetapi harus pula menghindari keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya. Hal ini bertujuan agar akuntan publik dapat memberikan opini yang obyektif dan jujur atas laporan keuangan klien. Sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan.

Kepercayaan masyarakat terhadap sikap independensi akuntan publik sangat penting, artinya bagi perkembangan perkembangan akuntan publik itu sendiri. Persepsi masyarakat mengenai sikap mental independensi akuntan sulit dilakukan dipertahankan. Kepercayaan masyarakat akan menurun bila independensi akuntan juga menurun (Mulyadi, 1990 : 20). Dalam praktek akuntan publik banyak mengalami kesulitan untuk menjaga dan mempertahankan independensinya. Sebagai pihak yang independen akuntan publik harus berjuang untuk menghilangkan anggapan bahwa akuntan publik bekerja menurut keinginan klien. Kredibilitas akuntan publik sekarang ini semakin dipertanyakan, karena sering dianggap menyimpang dari SPAP yang merupakan acuan untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal ini akuntan publik juga dinilai tidak jujur dan bertindak memihak pada kepentingan klien, atau dalam hal ini akuntan publik belum memiliki independensi, obyektifitas dan integritas yang memadai.

Penelitian-penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik telah dilakukan di Amerika Serikat yang meneliti faktor-faktor yang

mempengaruhi independensi akuntan publik. Diantaranya penelitian yang dilakukan Levin (1976) meneliti tiga faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi (1) ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa lain selain jasa audit, (3) lamanya hubungan audit dengan klien. Shockly (1981) meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu (1) pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, (2) persaingan antar kantor akuntan publik, (3) ukuran kantor akuntan publik, (4) lamanya hubungan audit.

Penelitian di Inggris mengenai independensi akuntan publik dilakukan oleh Firth (1990), meneliti peranan dan pentingnya auditor independen yang dipersepsikan oleh pihak yang berkepentingan. Penelitian di Indonesia mengenai independensi akuntan publik telah dilakukan oleh Supriyono yang mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi : (1) ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) persaingan antar kantor akuntan publik, (3) pemberian jasa lain selain jasa audit, (4) lamanya penugasan audit, (5) besarnya akuntan publik, (6) besarnya *fee audit*. Penelitian Suyatmini (2002) mengidentifikasi tujuh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu : (1) ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa lain selain jasa audit, (3) lamanya hubungan audit, (4) persaingan antar kantor akuntan publik, (5) besar kecilnya kantor akuntan publik, (6) besarnya *fee audit*, (7) mempunyai hubungan sosial dengan klien.

Penelitian ini mengacu dari penelitian terdahulu yaitu meneliti 7 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu : (1) Ikatan kepentingan keuangan

dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa lain selain jasa audit, (3) lamanya hubungan audit, (4) Persaingan antar kantor akuntan publik, (5) Besar kecilnya kantor akuntan publik, (6) Besarnya *fee audit*, (7) Mempunyai hubungan sosial dengan klien, dengan alasan bahwa, dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam Suyatmini (2002) hasil penelitian Schulte (1965), Hartley dan Ross (1972), serta Goldman dan Berlev (1974) menunjukkan bahwa pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien cenderung meningkatkan independensi akuntan publik. Hal ini disebabkan karena akuntan publik lebih mengetahui keadaan kliennya sehingga relatif mempunyai kekuatan untuk menghadapi tekanan klien di dalam mempertahankan independensinya. Sebagai contoh penelitian empiris yang mendukung pendapat bahwa pemberian jasa lain selain jasa audit dapat menimbulkan akibat negatif terhadap independensi akuntan publik telah dilakukan oleh Briloff (1966), dan Titard (1971). Demikian untuk faktor lamanya hubungan audit dengan klien hasilnya juga betentangan, hal ini juga dilihat dari hasil penelitian Lavin (1976) dengan responden para pemakai laporan keuangan pada umumnya berpendapat bahwa faktor ini mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, sedang penelitian Shockly (1980) menunjukkan bahwa faktor lamanya hubungan audit dengan klien tidak signifikan dalam mempengaruhi independensi. Suyatmini (2002) yang menggunakan responden pemakai jasa audit ada dua faktor yang tidak berpengaruh terhadap independensi akuntan publik yaitu faktor persaingan antar kantor akuntan publik dan faktor ukuran kantor akuntan publik. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pemakai laporan

keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Pemakai laporan keuangan dibatasi pada Direktur Utama atau Direktur Keuangan yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Pemilihan pemakai jasa audit didasari bahwa mereka mengetahui kinerja akuntan publik dan mereka juga mengetahui hasil laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap independensi akuntan publik merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai arti yang besar pada akuntan publik itu sendiri, serta hasil dari penelitian terdahulu yang masih berbeda-beda hasilnya serta independensi kantor akuntan publik masih diragukan. Mendasari timbulnya permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien dengan independensi akuntan publik.
2. Apakah terdapat pengaruh antara pemberian jasa lain selain jasa audit dengan independensi akuntan publik.
3. Apakah terdapat pengaruh antara lamanya hubungan audit dengan klien dengan independensi akuntan publik.

4. Apakah terdapat pengaruh antara persaingan antar kantor akuntan publik dengan independensi akuntan publik.
5. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran kantor akuntan publik dengan independensi akuntan publik.
6. Apakah terdapat pengaruh antara besarnya *audit Fee* dengan independensi akuntan publik.
7. Apakah terdapat pengaruh antara hubungan sosial dengan independensi akuntan publik.
8. Apakah terdapat pengaruh antara ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha, pemberian jasa lain selain jasa audit, lamanya hubungan audit dengan klien, persaingan antar kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, besarnya *audit Fee*, hubungan sosial secara bersama-sama dengan independensi akuntan publik.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien dengan independensi akuntan publik.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pemberian jasa lain selain jasa audit dengan independensi akuntan publik.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara lamanya hubungan audit dengan klien dengan independensi akuntan publik.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara persaingan antar kantor akuntan publik dengan independensi akuntan publik.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara ukuran kantor akuntan publik dengan independensi akuntan publik.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara besarnya *audit Fee* dengan independensi akuntan publik.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara hubungan sosial dengan independensi akuntan publik.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha, pemberian jasa lain selain jasa audit, lamanya hubungan audit dengan klien, persaingan antar kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, besarnya *audit Fee*, hubungan sosial secara bersama-sama dengan independensi akuntan publik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ke pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik.

2. Memberikan informasi dan masukan-masukan pada masyarakat umum dan khususnya para pemakai laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik atau yang berkepentingan dengan profesi akuntan publik tentang beberapa faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Telaah Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Profesi**

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa pemeriksaan akuntan atau laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Di Indonesia profesi akuntan publik keberadaannya telah diakui secara resmi oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 34 tahun 1954. Kriteria yang menetapkan apakah suatu pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi akan dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

Hadibroto (1982:5) menjelaskan pengertian profesi sebagai kumpulan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas serupa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bahwa harus berdasarkan suatu disiplin pengetahuan khusus.
2. Bahwa diperlukan suatu proses pendidikan tertentu untuk memperoleh pengetahuan itu.
3. Bahwa harus ada standar-standar kualifikasi yang mengatur jika mau memasukinya dan harus ada pengakuan formal mengenai statusnya.
4. Bahwa harus ada norma perilaku yang mengatur hubungan antara profesi dengan langganan, teman sejawat dan publik maupun penerimaan tanggung jawab yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang melayani kepentingan umum.
5. Bahwa harus ada suatu organisasi yang mengabdikan diri untuk memajukan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat, disamping itu untuk kepentingan-kepentingan kelompok itu.

Sedangkan menurut Roy dan Me Neill (1990:66) bahwa ciri-ciri dari profesi yang mapan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Terikat oleh prinsip-prinsip etik dengan tekanannya pada kebajikan pelayanan, kejujuran, integritas, serta pengabdian pada kesejahteraan yang dilayani.
3. Mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota yang diatur dengan undang-undang.
4. Mempunyai prosedur dalam menegakan disiplin anggota, yang melanggar kode etik.
5. Mempunyai pengetahuan minimal dalam bidang keahliannya yang diperoleh melalui pendidikan formal.
6. Mempunyai bahasa sendiri dan mengenal hal-hal yang sangat teknis hanya dimengerti oleh mereka yang menjadi anggota.

Dari beberapa karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik sebagai suatu profesi dengan alasan:

1. Memiliki spesialisasi pengetahuan dan pendidikan khusus.

Untuk mendapatkan kualifikasi sebagai seorang akuntan harus terlebih dahulu melalui proses pendidikan yang resmi. Di Indonesia seseorang disebut sebagai akuntan apabila seseorang telah lulus pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi di Institut atau Universitas Negeri dengan undang-undang No. 34 tahun 1954 dan memiliki register Negara atau mereka yang lulus Ujian Negara Akuntansi (UNA) profesi.

2. Persyaratan tertentu harus dimiliki untuk memasuki profesi tersebut yang diatur oleh undang-undang. Di Indonesia syarat untuk melakukan praktek akuntan publik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 763/KMK.001/1986 tentang akuntan publik.

### 3. Memiliki kode etik.

Etika profesi diperlukan untuk mengatur bidang moral agar para akuntan publik dapat diterima dimasyarakat baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam hal ini IAI telah menyusun kode etik profesi akuntan publik dan telah bebrapa mengalami perubahan.

### 4. Kepentingan masyarakat

Dalam melaksanakan pekerjaanya akuntan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat, karena akuntan merupakan kepercayaan masyarakat. Untuk diakui sebagai profesi akuntan, maka akuntan mempunyai hak dasar kemampuan profesinya untuk merumuskan secara bebas dari pengaruh pihak manapun. Tetapi dalam membuat keputusan akuntan harus tunduk pada norma-norma profesi yang telah ditetapkan.

### 5. Memiliki organisasi profesi.

Organisasi profesi akuntan telah terbentuk yaitu IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia) sejak tahun 1957, yang berfungsi sentral operasi dalam perumusan perbaikan termasuk memperbaiki spesialisasi pengetahuan, tanggung jawab kepada masyarakat, kode etik itu sendiri dan sebagainya.

#### **2.1.2 Kode Etik Profesi.**

Kode etik profesi merupakan prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberi pedoman dalam hubuinganya dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi serta pihak yang bekepentingan lainnya. Kode etik dapat berupa aturan

umum mengenai tingkah laku yang baik atau aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilakukan. Agar masyarakat percaya bahwa pekerjaan akuntan publik dilaksanakan dengan baik, maka perlu bagi profesi akuntan untuk meningkatkan mutu pemeriksaanya dan melaksanakan tugasnya dengan seksama. Kode etik profesi diharapkan dapat membantu para akuntan publik untuk mencapai mutu pemeriksaanya. Untuk menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya masyarakat harus memiliki prinsip-prinsip etik sebagai berikut:

1. Independensi, integritas dan obyektifitas.

Seorang akuntan publik harus menjaga kejujuranya dan obyektifitas ketika melakukan pemeriksaan serta harus independen terhadap klien yang diperiksa.

2. Kompetensi dan standar teknis.

Seorang akuntan publik harus menjalankan standar teknis profesi dan berusaha untuk senantiasa meningkatkan keahlian/kecakapan serta kualitas pelayanannya.

3. Bertanggung jawab kepada klien.

Seorang akuntan publik harus jujur dan terus terang pada kliennya serta memberikan pelayanan profesi kepada mereka semaksimal mungkin sesuai dengan kepentingan mereka, konsisten dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

4. Bertanggung jawab kepada kolega.

Seorang akuntan harus berperilaku sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan hubungan baik diantara sesama anggota profesi.

5. Bertanggung jawab kepada praktek lainnya.

Seorang akuntan publik harus menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga akan mempertinggi martabat profesi dan kemampuannya dalam memberi pelayanan pada masyarakat.

Sutojo (1991:7) mengemukakan lima prinsip dasar yang harus ada dalam kode etik profesi. Prinsip dasar ini harus dipegang teguh oleh akuntan publik. Prinsip dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Independen artinya membebaskan diri dari semua kepentingan yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan integritasnya, serta juga tampak oleh semua pihak integritas dalam arti terus terang, jujur dan bersungguh-sungguh.
2. Obyektif yaitu tidak memihak, tidak bias dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga adil bagi semua pihak.
3. Akuntan publik membebaskan diri dari kepentingan yang dapat menimbulkan dugaan akuntan publik tidak independen.
4. Dapat memegang rahasia, semua informasi yang diperoleh mengenai kliennya dirahasiakan dan tidak digunakan maksud apapun kecuali atas izin klien, atas kehendak hukum atau atas kehendak ikatan profesi.
5. Kompeten, dalam arti mampu mematuhi standar teknis profesi dan terus menjaga tingkat kemampuannya selama karier profesinya.

Kode etik akuntan Indonesia tahun 1990 yang berisi 8 bab dan sebelas pasal, telah memuat prinsip-prinsip dasar etik seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa akuntan publik Indonesia bekerja melindungi kepentingan masyarakat. Pasal-pasal yang memuat prinsip dasar tersebut adalah :

1. Integritas dan obyektifitas dimuat dalam ayat 2 pasal 1.

Integritas dan obyektifitas akuntan publik memudahkan bagi masyarakat untuk mempercayainya, karena apabila pendapat dan kesimpulan yang dibuat

akuntan publik bersifat obyektif, maka masyarakat akan merasa diperlakukan secara adil

2. Independen dimuat dalam ayat 1 pasal 6 yaitu pasal yang khusus mengatur kode etik tambahan untuk akuntan publik. Independensi mendukung keyakinan masyarakat mengenai integritas dan obyektifitas akuntan publik. Makin independen akuntan publik, maka akan makin kecil kemungkinannya dipengaruhi obyektifitasnya.
3. Dapat memegang rahasia klien dimuat dalam pasal 4. Akuntan publik dituntut untuk dapat merahasiakan dan menekan keinginannya untuk menceritakan informasi mengenai klien kepada orang lain.
4. Kompetensi diatur dalam ayat 1, 2, dan 3, pasal 2, pasal 3 pasal 5 dan ayat 2, pasal 6. Akuntan publik harus kompeten didalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

### **2.1.3. Independensi**

Independensi adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Eric (1975) dalam artikel Antle (1984) mendefinisikan independensi sebagai suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya. Athur (1978) dalam artikel yang sama mengatakan bahwa independensi professional adalah suatu konsep fundamental dari profesi akuntan.

Independen secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada dengan *American Institute of Certified Publik Accountant (AICPA)* dan Kella Et al (1989) dalam artikel Pincus (1991) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan obyektivitas. Meskipun integritas dan obyektivitas tidak dapat diukur secara pasti, tapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Sedangkan obyektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta yang dihadapi. Mulyadi (1990 : 20) menyatakan bahwa independensi merupakan sikap kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif dan tidak memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.

Didalam kode etik akuntan tahun 1994 menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Setiap akuntan harus tetap memelihara integritas dan obyektivitas dalam tugas profesionalnya dan seorang auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau yang berpengaruh tidak layak. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak obyektif dan dengan integritas yang tinggi. Integritas berhubungan dengan kejujuran intelektual akuntan, sedang obyektivitas berhubungan dengan sikap

mental netral dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan menyiapkan laporan audit. Independensi mencakup dua pengertian yaitu: Pertama, independensi dalam kenyataan atau *in fact*. Dalam pengertian ini independensi diri akuntan dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpai pada pemeriksaan diberikan dengan jujur dan obyektif. Kedua, Independen dalam penampilan atau *independence in appearance*. Dalam pengertian ini independensi dipandang dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri akuntan (Kell, Walter G William C. Boynton, 1992 : 51).

Mulyadi (1990 : 49) menyatakan independensi auditor mempunyai tiga aspek yaitu : (1) Independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya, aspek independen ini disebut dengan independen dalam kenyataan atau *independence in fact*. (2) Independen ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri seorang auditor, aspek independensi ini disebut dengan istilah independensi penampilan atau *perceived independence* atau *independence in appearance*. (3) Independensi dipandang dari sudut keahliannya, seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia mempunyai keahlian mengenai audit dan fakta tersebut. Seorang akuntan publik yang tidak mempunyai pengetahuan tentang komputer, tidak akan dapat mempertimbangkan dengan obyektif informasi yang tercantum dalam laporan laporan keuangan yang diolah dengan menggunakan computer. Akuntan tidak memiliki independensi bukan karena tidak adanya kejujuran dalam dirinya, melainkan karena tidak adanya keahlian mengenai

obyek yang diperiksanya. Kopetensi akuntan publik menentukan independen tidaknya akuntan tersebut dalam mempertimbangkan fakta yang diperiksanya. Didalam penelitian ini menekankan pada independensi penampilan atau *independensce in appearance* yaitu independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain, karena independensi keahlian sebenarnya termasuk dalam independensi dalam kenyataan (*Independence in fact*) dan aspek independensi dalam kenyataan ini sulit untuk dibuktikan, karena berhubungan dengan sikap mental, oleh karena itu peneliti tidak meneliti independensi dalam kenyataan tetapi meneliti independensi penampilan (*independence in appearance*).

Penilaian masyarakat terhadap independensi akuntan publik pada umumnya tidak hanya perseorangan tetapi dari segi profesi akuntan publik secara keseluruhan. Jika masyarakat mempersepsikan seorang akuntan publik atau suatu Kantor Akuntan Publik gagal dalam mempertahankan sikap independensi, maka kemungkinan besar akan beranggapan bahwa seluruh akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik khususnya dalam peberian jasa audit yang autputnya adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Persepsi responden terhadap independensi akuntan publik dipengaruhi oleh penampilan akuntan publik. Apabila independensi penampilan akuntan publik yang diindera atau ditangkap responden tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka masyarakat akan mempersepsikan akuntan publik tidak independen lagi. Jadi perilaku akuntan publik sangat mempengaruhi responden dalam memberikan persepsi,

sehingga perlu diketahui fakta yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku akuntan publik.

#### **2.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik**

##### **2.1.4.1. Ikatan Kepentingan Keuangan Dan Hubungan Usaha Dengan Klien.**

Akuntan publik harus bebas dari ikatan keuangan dan hubungan dengan klien yang diperiksa, jika tidak akan mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik.

*Code of Profesional Ethics (Rule 101-Independence)* menyatakan bahwa:

Seorang anggota atau kantor akuntan publik yang bertindak sebagai partner atau pemegang saham tidak boleh menyatakan suatu pendapat terhadap laporan keuangan suatu perusahaan kecuali ia atau kantornya independen dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut (Cormicchael dan Willingham, 1987 :42).

Selanjutnya, *rule* tersebut menyatakan bahwa independensi akuntan publik akan dianggap lemah apabila :

1. Selama periode perjanjian kerja atau saat menyatakan pendapatnya, dia atau kantornya.
  - (1a) Memiliki atau telah sanggup memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material didalam perusahaan yang diperiksanya, atau.
  - (1b) Sebagai *trustee*, atau eksekutor, atau administrator satu atau beberapa “*estate*” yang memiliki atau telah sanggup memiliki kepentingan

keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang diperiksanya atau

- (2) Memiliki investasi bersama di dalam bisnis dengan perusahaan yang diperiksanya atau dengan karyawan penting, direktur atau pemegang saham utama perusahaan yang diperiksa yang jumlahnya material dalam hubungannya dengan kekayaan bersih kantornya, atau
- (3) Mempunyai hutang atau piutang pada perusahaan yang diperiksanya atau karyawan penting atau pemegang saham utama. Hutang atau piutang ini tidak mencakup hutang atau piutang akuntan pemeriksa atau kantornya kepada lembaga keuangan yang diperiksanya jika utang atau piutang tersebut melalui prosedur, jangka waktu dan syarat-syarat yang normal : (a) hutang yang diperoleh akuntan atau kantor akuntannya yang tidak material duhubungkan dengan kekayaan bersih peminjam, (b) hipotik rumah, (c) hutang lain yang dijamin, kecuali hutang yang dijamin oleh kantor akuntan pemeriksa yang tidak cukup jaminannya.

2. Di dalam periode laporan keuangan, selama periode kontrak kerja pemeriksaan atau saat menyatakan pendapat, dia atau kantor akuntanya:

- (2a) Bertindak sebagai promoter, penjamin emisi surat berharga, direktur atau karyawan penting atau dalam kedudukanya setara dengan anggota manajemen atau karyawan penting perusahaan yang diperiksa, atau
- (2b) Sebagai trustee dana pensiun atau "*profit sharing trust*" perusahaan yang diperiksanya.

Untuk memperjelas *rule* independen tersebut, AICPA mengeluarkan delapan butir interpretasi mengenai *rule* 101-Independensi. Salah satu interpretasi adalah penerapan *rule* 101 terhadap personal profesional yang diatur dalam *rule* 101.7 menyatakan sebagai berikut:

Istilah “ia atau kantor akuntanya” seperti yang digunakan dalam kalimat pertama *rule* 101 berarti (1) seluruh partner atau pemegang saham dalam kantor akuntan yang bersangkutan, (2) seluruh karyawan profesional baik yang tetap maupun yang tidak tetap, ikut serta dalam perjanjian atau berkedudukan dalam suatu kantor yang ikut dalam suatu perjanjian kerja (Hermanson, 1987:88).

Levin (1976) selama meneliti beberapa faktor ikatan keuangan dan hubungan usaha yang telah dikemukakan oleh AICPA juga meneliti faktor ikatan keuangan dan hubungan usaha lainnya yang meliputi : (1) akuntan publik menempati atau mengelola bangunan yang dimiliki oleh klien, (2) akuntan publik menyewa kapasitas komputer milik klien, (3) hubungan famili antara saudara akuntan pemeriksa dengan pimpinan perusahaan yang diperiksanya.

#### **2.1.4.2. Pemberian Jasa Lain Selain Jasa Audit**

Semakin berkembangnya dan kompleksitas perusahaan, akan mendorong manajemen membutuhkan jasa-jasa lain selain jasa audit. Sering kali klien yang diaudit meminta kepada kantor akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan akuntan untuk memberikan jasa lain selain jasa audit (Supriyono 1988:42). Permintaan tersebut didorong karena manajemen memandang bahwa dari pemeriksaan tersebut akuntan publik dapat mengetahui masalah-masalah dan

kesulitan-kesulitan yang dihadapi manajemen sehingga diharapkan masalah dan kesulitan tersebut dapat dipecahkan dengan tepat dan cepat.

Dapat juga terjadi yang sebaliknya, suatu kantor akuntan publik yang semula hanya memberikan jasa lain selain jasa audit pada klien tertentu tetapi karena hubungan yang sudah terjalin tersebut, selanjutnya kantor akuntan tersebut diminta untuk mengaudit laporan keuangan klien. Jasa lain selain jasa audit tersebut meliputi: Konsultasi manajemen, Penyusunan sistem akuntansi, Pendidikan dan pelatihan, Studi Kelayakan, Pemeriksaan khusus, dan jasa non audit lainnya untuk memperlancar usaha klien.

Selain jasa tersebut di atas masih banyak lagi jasa-jasa lain yang dapat diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya. Pemberian jasa lain selain jasa audit kemungkinan dapat berakibat akuntan publik kehilangan independensinya. Hal ini mungkin disebabkan beberapa alasan sebagai berikut: (1) Kantor akuntan yang memberikan saran-saran kepada klien cenderung memihak pada kepentingan kliennya sehingga dapat kehilangan independensi di dalam melaksanakan pekerjaan audit, (2) Kantor akuntan merasa bahwa dengan pemberian jasa lain selain jasa audit tersebut, harga dirinya dipertaruhkan untuk keberhasilan kliennya, sehingga cenderung tidak independen di dalam melaksanakan audit. (3) Pemberian jasa lain selain jasa audit mungkin mengharuskan kantor akuntan membuat keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik menjadi tidak independen di dalam melaksanakan audit, (4) Kantor akuntan yang melaksanakan pemberian jasa lain

selain jasa audit mungkin mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manajemen klien sehingga kemungkinan kurang independen di dalam melaksanakan audit.

#### **2.1.4.3. Lamanya Hubungan Audit Dengan Klien.**

*SEC Practice section* dari AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner akuntan pada klien tertentu menjadi dua (Shockley, 1981): (1) lima tahun atau kurang, (2) lebih dari lima tahun. Seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama sehingga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap independensinya.

Bagi masyarakat yang menggunakan laporan keuangan audit, ketentuan yang dibuat oleh AICPA tersebut diatas sulit untuk dibuktikan karena laporan audit biasanya hanya menunjukkan nama kantor akuntan tanpa menunjukkan staf dan partner yang melaksanakan audit. Keterbatasan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih menitik beratkan kredibilitas suatu laporan audit dari segi kantor akuntan daripada individu atau staf kantor akuntan yang melaksanakan audit. Penelitian Levin (1976) dan Shockley (1980) menggunakan kantor akuntan sebagai kriteria penentuan lamanya penugasan audit.

#### **2.1.4.4. Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik**

Persaingan yang begitu ketat antara kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap independensi akuntan publik. Persaingan yang ketat dapat berakibat solidaritas professional akuntan publik menurun, sehingga

untuk mempertahankan klien agar tidak berpindah ke kantor akuntan lain, kantor akuntan cenderung tunduk pada tekanan klien (Mautz dalam supriyono, 1988:41). Di pihak lain berpendapat bahwa persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh relatif kecil terhadap independensi akuntan publik. Hal ini disebabkan karena kantor akuntan dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan menggunakan dasar prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan akuntan yang sama (Arens,1989 :174). Jadi disini ada perbedaan pendapat yang saling bertentangan tentang persaingan antar kantor akuntan publik ini terhadap independensi akuntan publik. Dalam penelitian Sockley (1980) menunjukan bahwa persaingan yang tajam meningkatkan resiko rusaknya independensi akuntan publik.

#### **2.1.4.5. Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Untuk menentukan ukuran kantor akuntan publik dapat digunakan sebagai variabel sebagai ukuran pengganti (supriyono, 1988:58). AICPA menggolongkan kantor akuntan ke dalam kantor akuntan besar dan kantor akuntan kecil. Kantor akuntan besar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kantor akuntan yang berafiliasi, sedangkan kantor akuntan kecil adalah kantor akuntan yang tidak berafiliasi. Kantor akuntan yang besar lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan yang kecil, dengan alasan bahwa: Untuk kantor akuntan besar, hilangnya satu klien tidak begitu mempengaruhi pendapatannya dan kantor akuntan besar biasanya mempunyai departemen audit yang terpisah dengan departemen yang memberikan

jasa lain kepada klien, sehingga dapat mengurangi akibat negatif terhadap independensi akuntan publik (Hartley dan Ross dalam Supriyono, 1988:6).

#### 2.1.4.6. *Audit Fee*

Profesi akuntan publik mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain seperti profesi dokter atau profesi pengacara. Profesi dokter maupun pengacara dalam menjalankan keahliannya menerima *fee* dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Sedangkan profesi akuntan publik juga memperoleh *fee* dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, tetapi akuntan publik harus independen, tidak memihak pada kliennya. Karena yang memanfaatkan hasil pemeriksaannya terutama adalah pihak lain selain kliennya (Mulyadi, 1990 : 21). Oleh karena itu independensi akuntan publik dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan publik tersebut dibayar oleh kliennya jasa yang diberikan tersebut.

Independensi akuntan publik akan diragukan apabila ia menerima *fee* selain yang telah ditentukan di dalam kontrak kerja, adanya *fee* bersyarat (*contingent fee*) dan menerima *fee* yang jumlahnya besar dari seorang klien yang diaudit. Dalam *Rule 302-Contingency fees, code of professional Ethics AICPA* melarang pemberian jasa dengan *fee* bersyarat.

Dalam rapat komisi Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1990 telah mempertegas bahwa imbalan yang diterima selain *fee* dalam kontrak dan *fee* bersyarat tidak boleh diterapkan dalam pemeriksaan. Kode etik tersebut menjelaskan:

Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya ( Kode Etik IAI, 1990 pasal 6, butir 5).

*Independence in fact* dan *independence in appearance* kantor akuntan publik perlu diragukan, apabila *fee* yang diterima dari seorang klien merupakan bagian yang signifikan dan keseluruhan pendapat kantor akuntan tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat bahwa *audit fee* yang besar dapat mengurangi independensi, mungkin didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kantor akuntan yang menerima *audit fee* besar merasa tergantung pada klien, meskipun pendapat klien mungkin tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau mengakibatkan akuntan pemeriksa atau mengakibatkan akuntan pemeriksa tidak dapat melaksanakan norma pemeriksaan akuntan secukupnya.
2. Kantor akuntan yang menerima *audit fee* besar dari seorang klien takut kehilangan klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannya sehingga kantor akuntan tersebut cenderung tidak independen.
3. Kantor akuntan cenderung memberikan "*Countepart fee*" yang besar kepada salah satu atau beberapa pjabat kunci klien yang diaudit, meskipun hal ini dilarang oleh kode etik, sehingga tindakan ini cenderung menimbulkan hubungan yang tidak independen dengan kliennya. (Supriyono, 1988:60).

Namun demikian dengan *audit fee* yang besar, mungkin akuntan publik lebih independen karena, dengan *audit fee* yang besar tersedia dana untuk penelitian dan penerapan prosedur audit yang lebih luas dan seksama.

#### **2.1.4.7. Hubungan Sosial**

Hubungan sosial yang dimaksud adalah dimana akuntan publik menjadi anggota atau pengurus pada badan-badan sosial. AICPA melalui interpretasi Rule 101-1 tentang jabatan direktur dan dewan kehormatan menjelaskan bahwa:

Anggota profesi akuntan sering diminta untuk meminjamkan prestis namanya direktur atau anggota dewan kehormatan untuk organisasi-organisasi non laba yang batas aktivitasnya sebagai lembaga amal, keagamaan, kemasyarakatan atau sejenis dengan itu. Seorang anggota yang mengizinkan namanya untuk maksud tersebut diatas dan yang berhubungan dengan laporan keuangan organisasi tersebut, tidak kehilangan independensinya menurut Rule 101 sepanjang: (1) posisinya benar-benar sebagai dewan kehormatan, (2) posisi tersebut diidentifikasi sebagai kehormatan di dalam semua kepala surat dan surat edaran keluar yang mana ia disebutkan sebagai direktur atau dewan kehormatan, (3) dia membatasi partisipasinya hanya kepada pemakai namanya, dan (4) dia tidak memberikan suaranya atau dengan kata lain berperan serta dalam fungsi manajemen. (Hermanson, 1987:88).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila akuntan publik menjadi anggota pengurus pada yayasan-yayasan sosial, tidak dapat memeriksa yayasan tersebut karena independensinya diragukan.

#### **2.2. Pemantauan IAI Terhadap Independensi Anggota**

Sebagaimana yang telah disampaikan dimuka independensi dan obyektifitas adalah tulang punggung profesi akuntan publik. Akuntan harus dapat menjaga sikap ini dalam menjalankan tugasnya agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dapat terjaga. Aturan sikap akuntan publik dinyatakan secara tegas dalam Standar Auditing Umum ke 2 dan Kode Etik Akuntan Indonesia. Anggota IAI

sebagai akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi aturan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kewajiban untuk mematuhi Kode Etik ini tidak hanya akuntan yang menjadi anggota IAI saja, tapi meliputi semua pihak yang bekerja dalam praktek profesi akuntan publiknya. Anggota profesi juga tidak diperkenankan membiarkan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan atas namanya melanggar kode etik profesi. Profesi akuntan publik harus dapat mempertahankan independensi dan obyektivitas dalam mempertimbangkan fakta yang dihadapi saat melaksanakan audit, karena tanpa adanya jaminan sikap independensi dan obyektivitas akuntan publik, masyarakat akan meragukan pendapat yang diberikan akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya.

IAI mencantumkan aturan mengenai independensi secara rinci dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Aturan-aturan tersebut merupakan pedoman bagi akuntan publik untuk bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasil kerjanya memiliki keandalan tinggi dan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Guna membantu anggota dalam menjaga sikap mental independensinya IAI mensyaratkan dilakukan *peer review* terhadap suatu Kantor akuntan publik oleh Kantor Akuntan publik yang lain atau komite yang terdiri dari anggota yang ditunjuk. *Peer Review* merupakan tinjauan untuk membandingkan kinerja Kantor Akuntan Publik tersebut. Tinjauan disini terdiri atas studi dan evaluasi sistem standar mutu KAP termasuk didalamnya sikap independensi serta melakukan uji kepatuhan KAP itu sendiri terhadap kebijakan dan prosedur standar mutunya. Tujuannya untuk menyatakan pendapat bahwa standar mutu KAP tersebut diyakini telah sesuai dengan

standar profesional akuntan publik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KAP tersebut independen dan hasil kerjanya dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Jika dalam *peer review* ditemukan bukti terjadi ketidakpatuhan terhadap standar mutu profesi atau kurang independen dalam melakukan tugasnya maka IAI dapat mengenakan sanksi pada akuntan publik yang bersangkutan. Sanksi dapat berupa peringatan, teguran *peer review* khusus, hingga yang terberat dikeluarkan dari keanggotaan IAI.

Untuk menjaga ketaatan anggotanya khususnya akuntan publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia maka IAI membentuk Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan diangkat dan bertanggung jawab terhadap Konggres IAI dan beranggotakan lima orang anggota IAI. Dewan kehormatan bertindak atas dasar pengaduan tertulis atau jika ada masalah yang perlu atas permintaan pengurus IAI mengenai pelanggaran Kode Etik Akuntan Indonesia yang dilakukan oleh anggota IAI. Kemudian Dewan Kehormatan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAI.

Kode Etik Akuntan dan Standar Profesi Akuntan Publik mempunyai hubungan yang erat yaitu memberi garis secara tegas mengenai keharusan akuntan publik bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan tugas profesinya. Standar umum ke 2 menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Pernyataan ini dipertegas lagi dalam Kode Etik pasal 12, 13 dan pasal 14. Standar

umum ke 3 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, kemudian dirinci dalam Kode Etik pasal 15, 16 dan pasal 17. Adanya hubungan ini menegaskan bahwa tidak hanya menumbuhkan sikap mental independen dari dirinya (*in fact*), namun harus juga menunjukkan pada masyarakat bahwa dirinya independen (*in appearance*). Sehingga tidak ada alasan lagi untuk meragukan hasil auditnya. Disamping itu akuntan publik harus memiliki kecakapan yang profesional yang cukup untuk mengerjakan penugasannya yang diterima agar supaya akuntan publik independen dalam mempertimbangkan fakta yang dihadapi (*competence*).

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Ada berapa penelitian terdahulu mengenai persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik telah dilakukan. Penelitian yang telah ada meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik dan tidak meneliti independensi akuntan publik dalam fakta. Di bawah ini disajikan tabel 2.1 yang berisi ringkasan hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 : Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Lavin ( 1976 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien</li> <li>• Pemberian jasa lain selain jasa audit</li> <li>• Lamanya hubungan audit dengan klien.</li> </ul>	Terdapat perbedaan persepsi mengenai pemberian jasa lain dan lamanya hubungan audit antara AICPA dengan pemakai laporan audit. Untuk ikatan keuangan dan hubungan usaha ada perbedaan persepsi.
Shockley ( 1981)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian jasa konsultasi pada klien</li> <li>• Persaingan antar kantor akuntan publik</li> <li>• Ukuran kantor akuntan publik</li> <li>• Lamanya hubungan audit.</li> </ul>	Terganggunya independensi akuntan publik jika memberika jasa konsultasi pada klien. Demikinan juga untuk kantor akuntaan yang kecil. Lamanya hubungan dengan klien tidak mempengaruhi independensi akuntas publik.
Supriyono ( 1988)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien</li> <li>• Persaingan antar kantor akuntan publik</li> <li>• Pemberian jasa lain selain jasa audit</li> <li>• Lamanya penugasan audit</li> <li>• Besarnya kantor akuntan publik</li> <li>• Besarnya <i>fee audit</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatan keuangan dengan kliennya dan ada hubungan bisnis dengan klien mempengaruhi independensi akuntan publik sebesar 48 %</li> <li>• Besarnya <i>fee audit</i> mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 42 %</li> <li>• Lamanya penugasan audit suatu kantor akuntan publik pada klien mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 34 %</li> <li>• Ukuran atau kecilnya kantor akuntan mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 27 %</li> <li>• Pemberian jasa lain selain jasa audit mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 8 %</li> </ul>
Suyatmini ( 2002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatan Kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien</li> <li>• Pemebrian jasa lain selain jasa audit</li> <li>• Lamanya hubungan audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, Pemberian jasa lain selain jasa audit, Lamanya hubungan audit, Besarnya <i>fee audit</i>, dan Hubungan sosial berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik</li> </ul>

	<p>dengan klien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persaingan antar kantor akuntan publik</li> <li>• Ukuran kantor akuntan publik</li> <li>• Besarnya <i>fee audit</i></li> <li>• Hubungan sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persaingan antar kantor akuntan publik dan Ukuran kantor akuntan publik tidak mempengaruhi independensi akuntan publik.</li> </ul>
--	---	---

#### 2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari penelitian yang telah dilakukan Lavin (1976), hasilnya menunjukkan mengenai jasa lain selain jasa audit dan lamanya hubungan audit dengan klien tertentu ternyata ada perbedaan persepsi antara pendapat AICPA dengan pendapat para pemakai laporan audit.

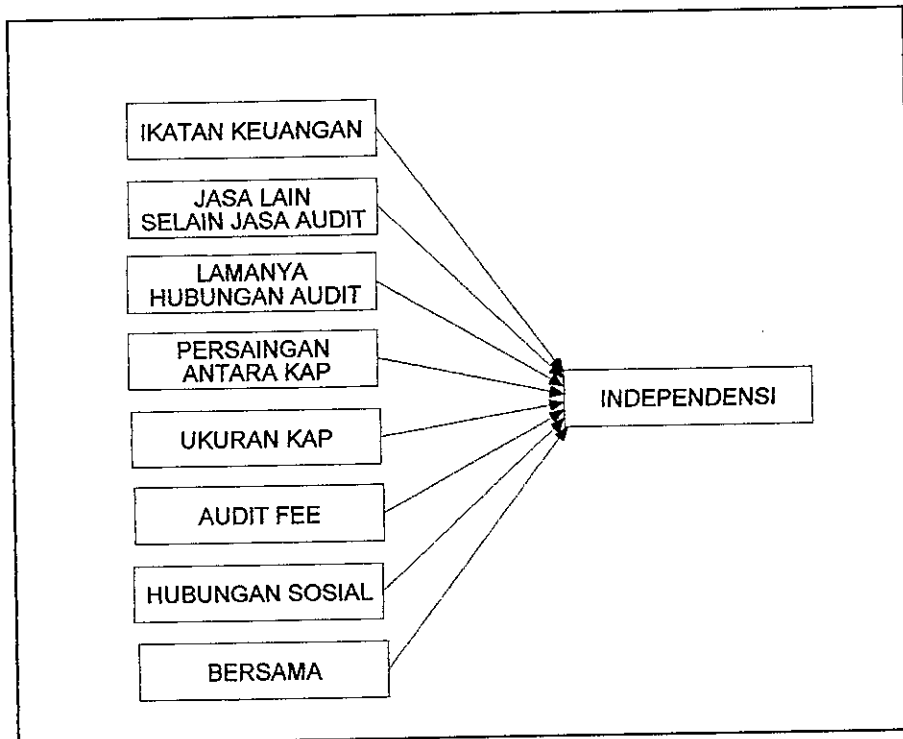
Masih di Amerika Serikat penelitian Shockley (1981), hasilnya menunjukkan bahwa kantor akuntan publik yang memberikan jasa konsultasi manajemen pada klien yang diaudit meningkatkan resiko rusaknya independensi akuntan publik. Supriyono (1988), hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa akuntan publik yang mengadakan ikatan keuangan dengan kliennya dan ada hubungan bisnis dengan klien mempengaruhi rusaknya publik memepengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 48 %. Besarnya *fee audit* mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 42 %. Lamanya penugasan audit suatu kantor akuntan publik pada klien mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 34 %. Ukuran atau kecilnya kantor akuntan mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 27 %. Pemberian jasa lain selain jasa audit mempengaruhi rusaknya

independensi akuntan publik sebesar 8 %. Penelitian Suyatmini (2002) mengidentifikasi tujuh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu : (1) ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa lain selain jasa audit, (3) lamanya hubungan audit, (4) persaingan antar kantor akuntan publik, (5) besar kecilnya kantor akuntan publik, (6) besarnya *fee audit*, (7) mempunyai hubungan sosial dengan klien. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, Pemberian jasa lain selain jasa audit, Lamanya hubungan audit, Besarnya *fee audit*, dan Hubungan sosial berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik

Variabel penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Suyatmini (2002), penelitian-penelitian tersebut diatas memberi inspirasi atau dorongan terhadap penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai independensi akuntan publik. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada respondenya yaitu dalam penelitian ini responden yang digunakan Direktur umum dan Direktur keuangan perusahaan di pulau Jawa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disusun kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Teoritis



Dalam penelitian ini hipotesisnya sebagai berikut:

- H1 : Ikatan kepentingan keuangan dan hubungannya dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.
- H2 : Pemberian jasa lain selain jasa audit berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.
- H3 : Lamanya hubungan audit dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik.
- H4 : Persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.

- H5 : Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap independensi akuntan publik.
- H6 : Besarnya *fee audit* berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.
- H7 : Adanya hubungan sosial dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.
- H8 : Ikatan kepentingan keuangan dan hubungannya dengan klien, pemberian jasa lain selain jasa audit, lamanya hubungan audit dengan klien, persaingan antar kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, besarnya *fee audit* dan hubungan sosial dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini pada dasarnya data digolongkan menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari para responden yaitu Direktur Utama atau Direktur Keuangan perusahaan di Pulau Jawa yang laporan keuangannya tahun buku per 31 Desember 2001 dan per Desember 2002 telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Kuesioner terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum, sedang bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan independensi akuntan publik. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti dan dasar-dasar teoritis tentang independensi akuntan publik.

#### **3.2. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel.**

Populasi dalam penelitian ini adalah pemakai jasa audit. Pemakai jasa audit dibatasi pada Direktur Utama atau Direktur Keuangan perusahaan di Pulau Jawa yang laporan keuangannya tahun buku per 31 Desember 2001 dan per desember 2002 telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Sedangkan sampel diambil secara *random sampling* terhadap perusahaan yang laporan keuangannya tahun buku per 31 Desember 2001 dan per Desember 2002 telah diaudit oleh kantor akuntan publik di

Jakarta yang merupakan wakil perusahaan di kota besar dan di Jawa Tengah sebagai wakil perusahaan diluar kota besar. Pemilihan pemakai jasa audit yang diaudit oleh kantor akuntan sebagai responden dalam penelitian ini didasarkan bahwa mereka mampu menilai dan mengetahui kinerja kantor akuntan publik, karena akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya, sehingga mereka juga mengetahui seberapa jauh akuntan publik melakukan pemeriksaan yang dikaitkan dengan independesinya.

Penelitian dilakukan dengan metode mail survey, dimana responden dikirim daftar kuesioner melalui pos dan disertai amplop dan perangko jawaban secukupnya. Apabila dalam seminggu dari batas waktu pengembalian yang telah ditentukan dalam kuesioner tidak dikembalikan, maka akan dikirim kuesioner susulan kepada responden. Tahap pertama peneliti akan menghubungi kantor akunta publik dan meminta alamat dan data klien baik datang secara langsung maupun melalui surat. Dalam penelitian ini ditentukan jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 100 responden. Jika tingkat *response rate* yang diharapkan adalah 20%, maka jumlah angket yang dikirimkan keresponden sebanyak 500 angket.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini datanya dikumpulkan melalui kuesioner yang dikirim langsung kepada responden melauai pos (*mail survey*). Kusioner tesebut terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum, sedang bagian kedua sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan independensi akuntan publik.

Kuesioner yang dikirim disertai surat permohonan serta penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Untuk menjaga kerahsiaan responden, maka kusioner dirancang tanpa mencantumkan indentitas diri. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap. Untuk pengiriman kuesioner diseretai amplop dan prangko pengembalian, apabila dalam seminggu kuesioner tidak dikembalikan, maka akan dikrimkan kuesioner susulan kepada responden.

### **3.4. Definisi Operasional Variabel**

#### **3.4.1. Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien.**

Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, yang dimaksud dalam penelitan ini adalah kantor akuntan publik secara lembaga ataupun personal didalamnya tidak mempunyai ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien seperti : kepemilikan saham, investor, eksekutor, administrator, mempunyai hutang piutang, sebagai penjamin emisidengan usahan kliennya. bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha antara akuntan publik atau kantornya dengan klien yang diperiksa dapat mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik. Untuk mengukur variabel ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, peneliti menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Lavin (1976). Instrumen tersebut banyak digunakan dalam penelitian-penelitan sebelumnya antara lain oleh Dykxhoorn and Sinning (1981). Setiap responden diminta untuk menjawab 10 butir pertanyaan yang mengukur ikatan kepentingan keuangan dan

hubungan usaha dengan klien dengan memilih skala diantara 1 sampai dengan 5. Dimana skala rendah menunjukkan akuntan publik semakain mempunyai ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien dan skala tinggi menunjukkan bahwa akuntan publik semakain tidak mempunyai ikatan kepentingan keuangan dan hubungannya usaha dengan klien. Adapun variabel indikatornya adalah sebagai berikut; kebebasan hubunga usaha, investasi bersama, hutang piutang, kepemilikan saham kepemilikan saham oleh staf, penjamin emisi, saham tidak langsung, pengelolaan asset, tempat berkantor dan penyewa peralatan.

#### **3.4.2. Pemberian Jasa Lain selain Jasa Audit.**

Jasa lain selain jasa audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa selain jasa audit kantor akuntan juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya kepada klien. Pemberian jasa lain selain jasa audit kemungkinan berakibat akuntan publik kehilangan independensi, Schulte (1965), Hartley dan Ross (1972), serta Golman dan Barlew (1974) dalam Suyatmini (2002). Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen dari Lavin (1976) yang dikembangkan oleh Nadirsyah. Peneliti menjabarkan dalam bentuk pertanyaan dan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Responden diminta untuk menjawab sejauh mana kesetujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan sebanyak tiga butir pertanyaan yang mengukur jasa lain selain jasa audit. Skala rendah menunjukkan bahwa semakin banyak jasa lain selain jasa audit yang diberikan oleh akuntan publik dan skala tinggi menunjukkan bahwa semakin sedikit jasa lain salin jasa audit yang diberikan oleh akuntan publik. Adapun

variabel indikatornya adalah, pemberian jasa non audit, gaji eksekutif dan pemberian jasa legal.

### **3.4.3. Lamanya Hubungan Audit dengan Klien**

Lamanya hubungan audit dengan klien yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa hubungan penugasan audit yang lama atau secara terus menerus mengakibatkan rusaknya independensi ekuntan publik, Taylor(1962), Lavin (1976), Sockley (1981). Untuk mengukur variabel ini peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Lavin (1976) dengan menggunakan atribut-atribut yang dijabarkan dalam 2 butir pertanyaan. Responden diminta untuk memberikan jawaban dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Skala rendah menunjukkan bahwa hubungan audit dengan klien semakin lama atau lebih dari lima tahun dan skala tinggi menunjukkan bahwa hubungan audit dengan klien tidak lama atau kurang dari lima tahun. Adapun variabel indikatornya adalah, lama penugasan kurang dari lima tahun dan lebih dari lima tahun.

### **3.4.4. Persaingan antar Kantor Akuntan Publik.**

Persaingan antar kantor akuntan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa semakin banyak anggota profesi akuntan publik mengakibatkan persaingan antar kantor akuntan yang satu dengan kantor akuntan yang lain semakin tajam. Persaingan yang tajam antar kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap independensi akuntan publik. Untuk mengukur variabel ini

peneliti menggunakan instrumen dari Lavin (1976) yang dikembangkan dengan atribut-atribut yang dijabarkan dalam 2 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Skala rendah menunjukkan persaingan tidak tajam dan skala tinggi menunjukkan persaingan semakin tajam. Adapun variabel indikatornya adalah, ketajaman persaingan.

#### **3.4.5. Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Ukuran kantor akuntan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa kantor akuntan yang besar adalah kantor akuntan yang berafiliasi, sedangkan kantor akuntan kecil adalah kantor akuntan yang tidak berafiliasi. Untuk mengukur variabel ini dengan menggunakan instrumen dari Lavin (1976) dan Sockly (1981) yang dikembangkan dalam atribut-atribut yang dijabarkan dalam 2 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Skala rendah menunjukkan ukuran kantor akuntan semakin kecil dan skala tinggi menunjukkan ukuran kantor akuntan semakin besar. Variabel indikatornya adalah independensi KAP besar dan KAP kecil.

#### **3.4.6. *Audit Fee***

*Audit fee* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa jumlah audit fee yang diterima oleh kantor akuntan dari klien tertentu mungkin merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan tersebut atau hanya merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan tersebut. Untuk mengukur variabel ini digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Lavin (1976) yang dijabarkan dalam 3

pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Responden diminta untuk memilih jawaban yang sesuai dengan memilih angka 1 sampai 5. Dimana skala rendah menunjukkan *audit fee* yang diterima merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan dan skala tinggi menunjukkan *audit fee* merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan tersebut. Adapun variabel indikatornya adalah, penerimaan fee, penetapan fee dan prosentase pendapatan fee.

#### **3.4.7. Hubungan Sosial**

Hubungan sosial yang dimaksud adalah dimana akuntan publik menjadi anggota atau pengurus pada badan-badan sosial bersama dengan klien. Untuk mengukur variabel ini digunakan instrumen dari Lavin (1976) dengan atribut-atribut yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dan di jabarkan dalam 2 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Dimana skala rendah menunjukkan akuntan publik semakin kecil kemungkinan menjadi anggota pengurus yayasan sosial dengan klien dan skala tinggi menunjukkan semakin besar kemungkinan akuntan publik menjadi anggota/pengurus yayasan sosial bersama dengan klien. Adapun variabel indikatornya adalah, keanggotaan yayasan sosial, pengauditan yayasan social.

#### **3.4.8. Independensi**

Independensi merupakan sikap kejujuran dalam diri akuntan publik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak

memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapat (Mulyadi, 1990 : 20). Dalam penelitian ini menekankan pada independensi penampilan atau *independence in appearance*, dimana independensi dipandang dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri akuntan (Kell, Walter G, William C. Boynton, 1992 : 51) dalam Suyatmini (2002). Adapun untuk mengukur variabel ini peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Lavin (1976) yang dijabarkan dalam 8 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Responden diminta untuk memilih jawaban yang sesuai melalui skala 1 sampai dengan 5. Skala rendah menunjukkan bahwa akuntan publik semakin tidak independen dalam melaksanakan tugasnya dan skala tinggi menunjukkan akuntan publik semakin independen dalam melaksanakan tugasnya. Adapun variabel indikatornya adalah kebebasan pengaruh, kejujuran, idealisme, pelayanan kepentingan umum, tanggung jawab hukum, tanggung jawab profesi, kecakapan auditing dan akuntansi.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan alat statistik yang terdiri dari:

1. Uji Kualitas Data
2. Uji Non Response Bias.
3. Asumsi-asumsi Klasik
4. Uji Hipotesis

### 3.5.1. Uji Reliabilitas dan Validitas Angket

Menurut Huck dan Cormier (1996), kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan pada masing-masing butir pertanyaan mempunyai hubungan yang besar terhadap nilai tiap variabelnya. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara item dengan fungsi ukuran secara keseluruhan. Sebuah butir dinyatakan valid bila memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) lebih besar dari nilai  $r_{table}$ . Uji reliabilitas dilakukan pada butir-butir yang valid. Teknik untuk menguji reliabilitas instrument yaitu dengan koefisien (Cronbach) Alpha. Instrumen dikatakan handal (reliable) apabila memiliki lebih dari 0,70 (Nunnaly, 1978).

### 3.5.2. Uji Non Response Bias.

Pengumpulan data dilakukan melalui jasa pos perlu dilakukan uji *response bias*. Pengujian *non-response bias* ini bertujuan untuk melihat karakteristik jawaban responden yang mengembalikan kuesioner dan yang tidak mengembalikan kuesioner. Tes ini membagi dua kelompok yaitu: (1) kelompok awal yang mengembalikan kuesioner yang diisinya sejak awal sampai batas waktu pengembalian yang diberikan peneliti, (2) Kelompok akhir (*late respon*) yaitu kelompok responden yang mengirimkan kembali kuesioner setelah satu minggu dari batas waktu yang ditentukan. Pengujian *non reponse bias* atas variabel yang diamati dalam penelitian ini menggunakan t- test.

### 3.5.3. Asumsi-asumsi Klasik

Dengan adanya penggunaan metode regresi linier berganda, untuk menghindari asumsi-asumsi klasik, maka akan dilakukan pengujian sebagai berikut:

#### 3.5.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, Untuk mendiagnosa adanya multikolinieritas adalah dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan model regresi harus mempunyai *tolerance* diatas 0,0001 dan VIF kurang dari 5. Jika VIF lebih dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas (Singgih Santoso, 2000:281).

#### 3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, (singgih Santoso, 2000 : 210).

#### 3.5.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi normal. Pengujian naormalitas ini dengan

menggunakan uji secara grafis yaitu uji normal *P-P plot of Regression Standardized Residual* (Imam Ghozali,2000).

#### 3.5.4. Uji Hipotesis

Metode statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah: Regresi berganda (*multiple regression*). Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini, metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Metode analisisnya dalam penelitian ini disajikan rumusnya sebagai berikut:

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + B_6X_6 + B_7X_7 + e$$

Dimana :

- Y = Independensi Akuntan Publik
- X1 = Ikatan keuangan dengan klien
- X2 = Pemberian jasa lain selain jasa audit
- X3 = Lamanya hubungan audit dengan klien
- X4 = Persaingan antar kantor akuntan publik
- X5 = Ukuran kantor akuntan publik

X6 = *Audit fee*

X7 = Hubungan sosial

B0 = *Intercept*

B1 = Koefisien variabel ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien

B2 = Koefisien variabel pemberian jasa lain selain jasa audit

B3 = Koefisien variabel lamanya hubungan audit

B4 = Koefisien variabel persingan antar KAP

B5 = Koefisien variabel ukuran KAP

B6 = Koefisien variabel audit fee

B7 = Koefisien variabel hubungan sosial

E = *Error*

Cara pengujianya dilakukan sebagai berikut:

#### **3.5.4.1. Pengujian Terhadap Koefisien Regresi (Uji Parsial)**

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t atau dengan menggunakan P value. Dalam uji t dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

Hipotesis diterima jika:

1.  $t \text{ hitung} > t \text{ table}$
2. Atau  $P \text{ value} < 0,05$

#### **3.5.4.2. Pengujian terhadap Pengaruh Variabel Independen secara bersama (simultan).**

Pengujian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, digunakan uji F.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil pengolahan data tersebut. Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut : deskripsi umum hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, analisis data yang berupa hasil analisis regresi, pengujian variabel independen secara parsial dan secara simultan atas model regresi, pembahasan tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **4.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode mail survey. Data dikumpulkan melalui kuesioneri-surat yang dikirim dan pemberian langsung kepada direktur utama datau direktur keuangan. Pengiriman dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003 dan data diharapkan sudah dapat dikumpulkan kembali paling lambat tanggal 20 Desember 2003.

Jumlah kuesioner yang dikirim sejumlah 500 lembar dan yang kembali sebanyak 104 lembar atau dengan tingkat pengembalian sebesar 20.8. %. Keseluruhan kuesioner yang diterima kembali kemudian diteliti kelengkapan dan kesesuiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria responden yang

diinginkan dalam penelitian ini adalah semua direktur utama datau direktur keuangan,. Dari 104 lembar kuesioner yang diterima kembali hanya 100 kuesioner yang dapat diolah dan dianalisis atau sebesar 20 %. Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat dalam tabel 4-1 berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Sampel Dan Tingkat Pengembalian

KETERANGAN	JUMLAH
Kuisisioner yang dikirim	500
Kuisisioner yang tidak kembali	396
Kuisisioner yang kembali	104
Kuisisioner yang tidak dapat diolah	4
Kuisisioner yang dapat diolah	100
Tingkat kembalian kuisisioner	20%

Sumber : data yang diolah

#### 4.2 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Profil dari 100 responden tersaji dalam data deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah direktur utama datau direktur keuangan. Data deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang: Lama bekerja, jabatan, pendidikan, latar belakang pendidikan dan umur. Penyajian data diskriptif penelitian bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut (Hair, et. al.,1995). Data

ini diperlukan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.

Dalam sub bab ini akan disajikan data deskriptif demografi responden. Data deskriptif penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 : Data Deskriptif Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Umur	Kurang dari 25 th	0	0
	Dari 26 th – 35 th	19	19
	Dari 36 th – 45 th	54	54
	Dari 46 th – 55 th	27	27
	Diatas 56 th	0	0
Jabatan	Direktur utama	24	24
	Direktur keuangan	76	76
Pendidikan	D3	38	38
	S1	55	55
	S2	7	7
	S3	0	0
Masa kerja	Kurang dari 3 th	3	3
	Antara 3 th – 6 th	32	32
	Antara 6 th – 9 th	39	39
	Antara 9 th – 12 th	18	18
	Lebih dari 12 th	8	8

Sumber ; data primer yang diolah

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berumur antara 36 tahun sampai 45 tahun yaitu sebesar 54%, disusul responden berumur antara 46 tahun sampai 55 tahun sebanyak 27%, dan kemudian responden berumur antara 26 tahun sampai 35 tahun sebanyak 19%. Selanjutnya data deskriptif kedua yaitu jabatan responden. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar jabatan responden adalah direktur keuangan sebanyak 76%, dan direktur utama sebanyak 24%. Pendidikan responden yang dominan adalah sarjana sebanyak 55%, D3 sebanyak 38%. Selanjutnya data deskriptif keempat yaitu Lama kerja. Sebagian besar lama kerja responden adalah antar 6 tahun sampai 9 tahun sebanyak 39%, sedangkan lama kerja antara 3 tahun sampai 6 tahun sebanyak 32%. Adapun statistik deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Untuk memberi gambaran tentang variabel-variabel penelitian, digunakan tabel statistik deskriptif. Adapun isi tabel tersebut adalah rata-rata, dan standar deviasi. Untuk memberi kejelasan tentang statistik deskriptif dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 ;  
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

VARIABEL	MIN.	MAK.	RATA-RATA	STANDAR DEVIASI
INDEPENDENSI	10	40	21.71	7.51335
IKATAN KEUANGAN	16	50	33.06	7.84164
JASA LAIN SELAIN AUDIT	12	50	35.29	8.75514
LAMANYA HUBUNGAN AUDIT	3	9	6.66	1.49896
PERSAINGAN ANTAR KAP	3	9	6.57	1.48566
UKURAN KAP	3	10	7.33	2.02537
AUDIT FEE	3	15	10.11	2.83875
HUBUNGAN SOSIAL	2	10	7.2	1.70561

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, untuk variabel independensi mempunyai nilai minimum 10 dan maksimum 40, rata-ratanya adalah 21.71 dan standar deviasinya 7.51. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel independensi cenderung sedang. Untuk variabel ikatan keuangan mempunyai nilai minimum 16 dan maksimum 50, rata-ratanya adalah 33.06 dan standar deviasinya 7.842. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel ikatan keuangan cenderung tinggi. Untuk variabel jasa lain selain audit mempunyai nilai minimum 12 dan maksimum 50 rata-ratanya adalah 35.29 dan standar deviasinya 8.75. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel jasa lain selain audit cenderung tinggi. Untuk variabel lamanya hubungan audit mempunyai nilai minimum 3 dan maksimum 9 rata-ratanya adalah 6.66 dan standar deviasinya 1.499. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel lamanya hubungan audit cenderung

tinggi. Untuk variabel persaingan antar KAP mempunyai nilai minimum 3 dan maksimum 9 rata-ratanya adalah 6.57 dan standar deviasinya 1.485. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel persaingan antar KAP cenderung tinggi. Untuk variabel ukuran KAP mempunyai nilai minimum 3 dan maksimum 10 rata-ratanya adalah 7.33 dan standar deviasinya 2.203. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel ukuran KAP cenderung tinggi. Untuk variabel *audit fee* mempunyai nilai minimum 3 dan maksimum 15 rata-ratanya adalah 10.11 dan standar deviasinya 2.838. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel *audit fee* cenderung tinggi dan hubungan sosial mempunyai nilai minimum 2 dan maksimum 10 rata-ratanya adalah 7.2 dan standar deviasinya 1.706. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel hubungan sosial cenderung tinggi.

#### **4.3. Uji Reliabilitas dan Validitas Angket**

Langkah pertama sebelum pengambilan data adalah melakukan uji reliabilitas dan validitas angket. Uji reliabilitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Dari hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS 10.0. Angket dikatakan reliabel jika mempunyai nilai korelasi Alpha dari Cronbach di atas 0.7 (Singgih, 2000). Hasil dari korelasi Alpha dari Cronbach untuk delapan variabel

penelitian yaitu variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* hubungan sosial dan independensi lebih besar dari 0.7 ( lihat tabel 4.4 ), maka dapat disimpulkan, hasil pengujian angket reliabel.

Tujuan Uji validitas angket adalah untuk mengetahui kehandalan angket. Adapun angket yang valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Agar angket dikatakan valid adalah jika hasil *corelasi* untuk masing-masing item dengan skor total didapat harga *Correlation Adjusted* lebih besar dari 0.239 ( Singgih, 2000). Dari hasil uji validitas item yang dilakukan dengan program statistik SPSS 10.0 didapat hasil *corelasi Adjusted* untuk masing-masing item seperti pada tabel. 4.4. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik, karena syarat minimum yang harus dipenuhi, terpenuhi yaitu *corelasi* untuk nilai masing-masing item dengan skor total didapat harga *Correlation Adjusted* lebih besar dari 0.239. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid. Adapun ringkasan hasil pehitungan dapat dilihat pada tabel 4.4. di bawah ini.

Tabel 4.4. : Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas dan Validitas

Variabel	Hasil Perhitungan Reliabilitas Alpha Cronbach	Variabel Indikator	Hasil Perhitungan Validitas Variabel indikator <i>Correlation Adjusted item- total</i>
INDEPENDENSI	0.9736	Y1	0.9432
		Y2	0.8873
		Y3	0.8917
		Y4	0.8678
		Y5	0.8707
		Y6	0.8581
		Y7	0.9144
		Y8	0.9267
IKATAN KEUANGAN	0.9196	X1	0.7076
		X2	0.7527
		X3	0.7457
		X4	0.7745
		X5	0.5790
		X6	0.7130
		X7	0.7872
		X8	0.7730
		X9	0.6338
		X10	0.5338
JASA LAIN SELAIN AUDIT	0.9654	X21	0.9095
		X211	0.8950
		X212	0.8380
		X212	0.8878
		X214	0.7056
		X215	0.9125
		X216	0.6871
		X217	0.8743
		X22	0.8424
		X23	0.9223
LAMANYA HUBUNGAN AUDIT	0.7727	X31	0.6296
		X32	0.6296
PERSAINGAN ANTAR KAP	0.7954	X41	0.6674
		X42	0.6674
UKURAN KAP	0.8463	X51	0.7366
		X52	0.7366
AUDIT FEE	0.9529	X61	0.9610
		X62	0.8599
		X63	0.8990
HUBUNGAN SOSIAL	0.8598	X71	0.7543
		X72	0.7543

Sumber : Data primer yang diolah

#### 4.4. Uji Respon Bias

Uji respon bias bertujuan untuk mengetahui apakah responden yang tidak mengembalikan kuisisioner mempunyai jawaban yang cenderung sama dengan responden yang mengembalikan angket. Prosedur yang digunakan adalah dengan membagi responden menjadi dua golongan yaitu golongan responden yang mengembalikan angket sebelum tanggal tertentu (dalam penelitian ini ditetapkan tanggal 28 November 2003) dan responden yang mengembalikan setelah pada tanggal 28 November 2003. Responen yang mengembalikan setelah tanggal 28 November 2003 merupakan wakil dari responden yang tidak mengembalikan kuisisioner. Metode yang digunakan dengan menggunakan uji beda. Jika tidak ada perbedaan secara statistik maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah respon bias. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Taabel 4.5 ; Hasil Uji Respon Bias

VARIABEL	NILAI T TEST	P-VALUE (2-TILE)
INDEPENDENSI	-0.488	0.627
IKATAN KEUANGAN	-0.439	0.661
JASA LAIN SELAIN AUDIT	0.970	0.334
LAMANYA HUBUNGAN AUDIT	-1.023	0.309
PERSAINGAN ANTAR KAP	-0.509	0.612
UKURAN KAP	1.109	0.270
AUDIT FEE	0.136	0.892
HUBUNGAN SOSIAL	0.258	0.797

Sumber : data yang diolah

Dari hasil perhitungan ternyata terlihat bahwa nilai dari P-value. (2-tile), ternyata lebih dari 0.05 untuk semua variabel. Hal ini memberi arti bahwa untuk semua variabel tidak terdapat perbedaan antara responden yang mengembalikan kuisisioner sebelum tanggal 28 November 2003 dengan responden yang mengembalikan kuisisioner sesudah tanggal 28 November 2003. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah respon bias dalam penelitian ini

#### **4.5. Analisis Data**

Dalam analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial sebagai variabel independen dan independensi variabel dependen. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah :

1. Uji asumsi klasik yang terdiri dari analisis normalitas data, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.
2. Uji regresi dari tujuh variabel independen.

##### **4.5.1 Pengujian Asumsi Klasik**

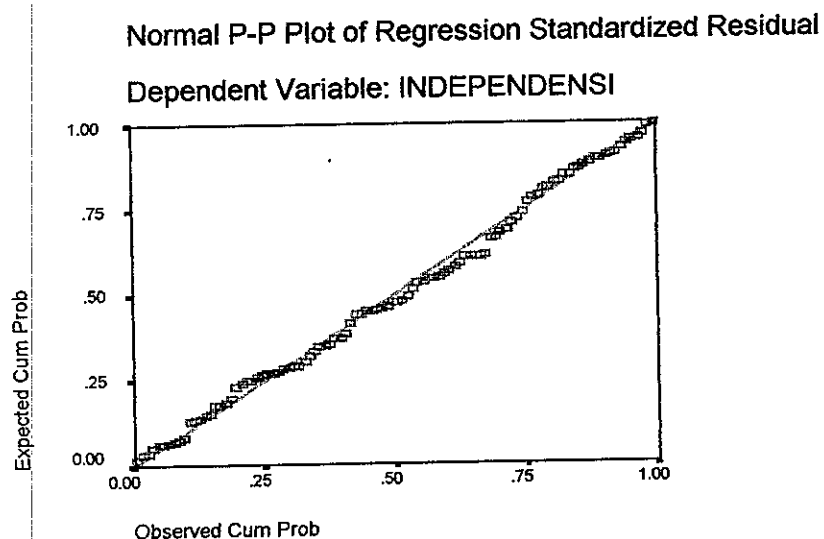
Suatu model dinyatakan baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrik yang melandasinya. Oleh karena

itu sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas.

#### 4.5.1.1. Uji Normalitas

Dalam uji normalitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan uji secara grafis, yaitu uji normal *P-P plot of Regression Standardized Residual* (Imam Ghozali,2000). Hasil dari uji normalitas data secara grafis tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 :  
Hasil Pengujian Normalitas Data



Sumber ; Output Regresi

Dari gambar 4.1. tersebut tampak bahwa titik-titik perpaduan antara variabel *observed Cum Prob* dengan *Expected Cum Prob* menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Menurut Imam

Ghozali (2000), deteksi penyebaran data yang memenuhi asumsi normalitas data adalah data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan model regresi layak dipakai sebagai suatu model yang baik, karena memenuhi asumsi normalitas data.

#### 4.5.1.2. Uji Multikolinearitas

Sebelum melakukan pengujian hipotesa dengan analisis regresi berganda terlebih dahulu data yang ada, diuji dan dideteksi kemungkinan adanya multikolinearitas. Tujuannya adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. *Tolerance Value*, *Variance Inflation Factor (VIF)*, *Condition Index (CI)* dan nilai *Pearson Corelation* dapat digunakan untuk menentukan adanya problem multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi. Penelitian ini peneliti menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Dari hasil perhitungan output regresi pada kolom VIF untuk variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial terlihat pada tabel 4.6. Gejala Multikolinearitas akan diidentifikasi dengan memperhatikan VIF, jika lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai tingkat multikolinearitas yang tinggi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain (Singgih Santoso, 2000).

Tabel 4.6 :  
 Nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*

VARIABEL	TOLERANCE	VIF
IKATAN KEUANGAN	0.753	1.327
JASA LAIN SELAIN AUDIT	0.725	1.379
LAMANYA HUBUNGAN AUDIT	0.768	1.303
PERSAINGAN ANTAR KAP	0.696	1.437
UKURAN KAP	0.859	1.164
AUDIT FEE	0.847	1.180
HUBUNGAN SOSIAL	0.685	1.459

Sumber : Hasil output regresi

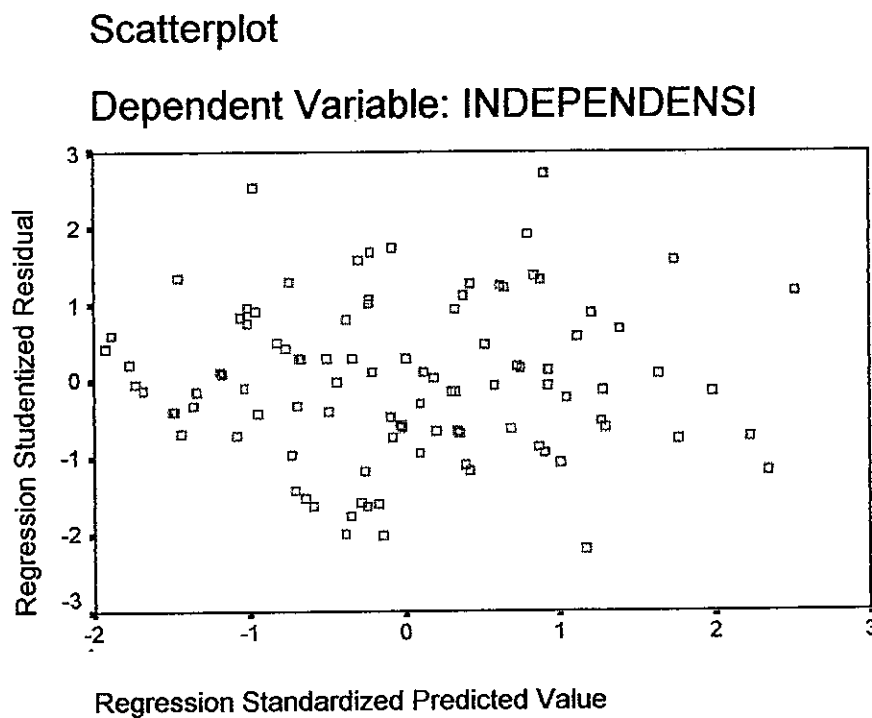
Dilihat dari nilai yang terdapat dalam tabel 4.6 tampak bahwa VIF untuk semua variabel penelitian besarnya kurang dari 5 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan tidak ada indikasi terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

#### 4.5.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam pengujian adanya heteroskedastisitas menggunakan pengujian secara grafis. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat grafik *scatter plot* yang menunjukkan tidak ada pola tertentu dimana titik-titik (*point-point*) menyebar

secara acak dan disekitar angka 0 baik disumbu X maupun sumbu Y. Menurut Imam Ghozali (2000), model tidak mengalami masalah heterokedastisitas jika *Scatterplot Plot Of Regression Standadized Predicted Value* dengan *Standadized Residual* berada disekitas angka 0. Adapun grafik dari persamaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.2.:  
*Grafik Scatterplot Plot Of Regression Standadized Predicted Value Dengan Standadized Residual*



Sumber ; Output Regresi

Terlihat bahwa grafik yang dibentuk mempunyai *Scatterplot Plot Of Regression Standadized Predicted Value* dengan *Standadized Residual* berada

disekitas angka 0. Dengan demikian persamaan regresi tersebut di atas tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

#### 4.6. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk pengujian F-test yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel independen. Uji T-test bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

##### 4.6.1 Uji F-Test

Uji F dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP, *audit fee* dan hubungan sosial sebagai variabel independen terhadap independensi sebagai variabel dependen.

Tabel 4.7. :  
Hasil Uji F Test

	HASIL UJI F-TEST
F HITUNG	24.203
F SIGN	0.000
KETERANGAN	SIGNIFIKAN

Sumber : data yang diolah

Secara keseluruhan variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial sebagai variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap independensi pada alpha 5% sebagaimana diperlihatkan pada  $F_{sign} \leq \alpha$  5%. Penerimaan hipotesis untuk persamaan penelitian dengan hasil  $F$  hitungnya adalah 24.203 dengan  $P$ -value sebesar 0,000. Hal ini berarti perubahan independensi dapat dijelaskan oleh perubahan yang terjadi pada variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial. Sehingga dapat disimpulkan model ini cukup baik digunakan untuk melihat pengaruh variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial terhadap independensi.

#### 4.6.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*Crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamat (Imam Ghozali 2001).

Dari hasil perhitungan menghasilkan nilai *R-square adajusted* sebesar 0.621 yang berarti bahwa 62.1 % variabel dependen yaitu independensi dapat dijelaskan oleh variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial. Sedangkan sisanya 37.9 % disebabkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

#### 4.6.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji ada pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel dependen dan independen peneliti menggunakan uji t atau t test. Adapun tahap-tahapnya :

##### 1. Menentukan hipotesis :

$H_0$  : Koefisien regresi tidak signifikan

$H_1$  : Koefisien regresi signifikan

##### 2. Kriteria pengujian :

- Jika t hitung (statistik) < t tabel maka  $H_0$  diterima
- Jika t hitung (statistik) > t tabel maka  $H_1$  diterima

##### 3. Tingkat signifikansi alpha 5%

$$df = n - k - 1 = 100 - 7 - 1 = 92$$

$$t \text{ tabel } (0,05;92 = 1.6615$$

Hasil perhitungan regresi untuk t hitung dapat dilihat dalam tabel berikut in.

Tabel 4.8 :  
Ringkasan Hasil Regresi

VARIABEL	KOEFISIEN ESTIMATE	T	Sig	KETERANGAN
(Constant)	61.968	19.44		
IKATAN KEUANGAN	-0.213	-3.125	0.002	Signifikan
JASA LAIN SELAIN AUDIT	-0.129	-2.077	0.041	Signifikan
LAMANYA HUBUNGAN AUDIT	-0.821	-2.321	0.023	Signifikan
PERSAINGAN ANTAR KAP	-0.93	-2.482	0.015	Signifikan
UKURAN KAP	1.149	4.643	0.000	Signifikan
AUDIT FEE	-0.367	-2.064	0.042	Signifikan
HUBUNGAN SOSIAL	-0.683	-2.076	0.041	Signifikan
Dependent Variable: INDEPENDENSI				

Sumber ; data yang diolah

Analisis regresi berganda dengan melihat besarnya koefisien regresi secara parsial dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independent yaitu variabel ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan audit fee dan hubungan sosial terhadap independensi. Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh parameter koefisien regresi, t signifikan, dan t hitung seperti pada tabel 4.8.

#### 4.6.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Parameter estimasi antara variabel ikatan keuangan dengan independensi yang dibentuk menghasilkan nilai t hitung -3.125, Dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari t tabel untuk DF sebesar 92 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu harga

mutlak 1.6615, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima pada tingkat signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P-value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0.002, karena P- value kurang dari 0.05, maka hipotesis diterima.

#### **4.6.3.2. Pengujian Hipotesis Kedua**

Parameter estimasi antara variabel jasa lain selain audit dengan independensi yang dibentuk menghasilkan nilai t hitung -2.077. dapat dilihat bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel untuk df sebesar 28 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu harga mutlak 1.6615, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pemberian jasa lain selain audit berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima pada tingkat signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0,041, karena P- value kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima.

#### **4.6.3.3. Pengujian Hipotesis Ketiga**

Parameter estimasi antara variabel lamanya hubungan audit dengan independensi yang dibentuk menghasilkan nilai t hitung -2.321. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari t tabel untuk df sebesar 92 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu harga mutlak 1.6615, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Lamanya hubungan audit dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik,

diterima pada tingkat signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0,023 karena P- value kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima.

#### **4.6.3.4. Pengujian Hipotesis Keempat**

Parameter estimasi antara variabel persaingan antar KAP dengan independensi yang dibentuk menghasilkan nilai t hitung -2.482. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih kecil dari t tabel untuk df sebesar 92 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu harga mutlak 1.6615, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima pada tingkat signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0,015 karena P- value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima..

#### **4.6.3.5. Pengujian Hipotesis Kelima**

Parameter estimasi antara variabel ukuran KAP dengan independensi yang dibentuk menghasilkan nilai t hitung 4.643. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari t tabel untuk df sebesar 92 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu harga mutlak 1.6615, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap independensi akuntan publik, diterima pada tingkat

signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0,000 karena P- value kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima.

#### **4.6.3.6. Pengujian Hipotesis Keenam**

Parameter estimasi antara variabel *audit fee* dan hubungan sosial dengan independensi yang dibentuk menghasilkan nilai t hitung -2.064. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih kecil dari t tabel untuk df sebesar 92 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu harga mutlak 1.6615, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Besarnya *audit fee* berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima pada tingkat signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0,042 karena P- value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima.

#### **4.6.3.7 Pengujian Hipotesis Ketujuh**

Parameter estimasi antara variabel ikatan keuangan dengan independensi yang dibentuk menghasilkan nilai t hitung -2.076, Dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari t tabel untuk DF sebesar 92 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu harga mutlak 1.6615, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Adanya hubungan sosial dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima pada tingkat signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0.041 karena P- value kurang dari 0.05, maka hipotesis diterima.

#### 4.6.3.8 Pengujian Hipotesis Kedelapan

Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai F hitung 24.203. Dapat dilihat bahwa nilai F hitung lebih besar dari t tabel untuk  $df_1$  adalah 7 dan  $df_2$  sebesar 92 tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu 2.09, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima pada tingkat signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0,000, karena P- value kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Adapun ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 :  
Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Bunyi Hipotesis	Hasil Pengujian
H1	Ikatan kepentingan keuangan dan hubunganny dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.	Signifikan
H2	Pemberian jasa lain selain jasa audit berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.	Signifikan
H3	Lamanya hubungan audit dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.	Signifikan
H4	Persaingan antara kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.	Signifikan
H5	Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap independensi akuntan publik.	Signifikan
H6	Besarnya <i>audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.	Signifikan
H7	Adanya hubungan sosial dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik.	Signifikan
H8	Ada pengaruh negatif yang signifikan dari ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan <i>audit fee</i> dan hubungan sosial secara bersama-sama terhadap independensi pada industri manufaktur.	Signifikan

Sumber ; Ringkasan penelitian

#### 4.7. Pembahasan hasil Penelitian

Untuk pembahasan hasil penelitian dari ketiga persamaan penelitian dapat dilihat di bawah ini tetapi untuk lebih jelasnya dapat dilihat ringkasan hasil penelitian yang seperti terlihat pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 :  
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

VARIABEL	ARAH	KETERANGAN
IKATAN KEUANGAN	Negatif	Signifikan
JASA LAIN SELAIN AUDIT	Negatif	Signifikan
LAMANYA HUBUNGAN AUDIT	Negatif	Signifikan
PERSAINGAN ANTAR KAP	Negatif	Signifikan
UKURAN KAP	Positif	Signifikan
AUDIT FEE	Negatif	Signifikan
DAN HUBUNGAN SOSIAL	Negatif	Signifikan

Sumber : data yang diolah

Dari tabel ringkasan di atas dapat dianalisis

### 1. Ikatan Keuangan dan Hubungan Bisnis

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ikatan keuangan dan hubungan bisnis memberi pengaruh yang negatif terhadap independensi kantor akuntan publik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, kantor akuntan publik yang mempunyai ikatan keuangan dan hubungan usaha seperti kepemilikan saham, eksekutor atau administrator, investor, hutang piutang, penjamin emisi surat berharga, *trustee* dana pensiun dan lain-lain, akan tidak mampu untuk menyampingkan pengaruh independensinya karena akuntan publik bertindak sebagai pelaksana sekaligus pembuat evaluasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (1988), Shockley (1981) dan Suyatmini (2002).

## **2. Jasa Lain Selain Audit**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jasa lain selain jasa audit memberi pengaruh yang negatif terhadap independensi kantor akuntan publik. Hal ini dapat disebabkan beberapa alasan seperti saran-saran yang diberikan kantor akuntan publik cenderung memihak pada kepentingan klien. Alasan lain yaitu dengan pemberian jasa lain akan membuat kantor akuntan publik harga dirinya dipertaruhkan untuk keberhasilan kliennya sehingga akan cenderung memihak kliennya. Kantor akuntan publik yang juga memberikan jasa lain mengharuskan kantor akuntan publik mengambil keputusan untuk klien sehingga mengganggu independensinya serta akan terjadi keeratan hubungan dengan manajemen klien sehingga akan tidak independen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lavin (1976), Supriyono (1988), Shockley (1981) dan Suyatmini (2002).

## **3. Lamanya hubungan audit**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya hubungan audit memberi pengaruh yang negatif terhadap independensi kantor akuntan publik. Hal ini dapat disebabkan dengan semakin lamanya hubungan klien dengan kantor akuntan publik terutama dengan auditornya akan menyebabkan hubungan personal yang erat sehingga kantor akuntan publik kehilangan independensinya. Dan ini dapat terjadi karena pemakai jasa audit cenderung melihat kredibilitas kantor akuntan publik dari

pada individunya atau stafnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lavin (1976), Supriyono (1988), dan Suyatmini (2002).

#### **4. Persaingan antar KAP**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan antar kantor akuntan publik memberi pengaruh yang negatif terhadap independensi kantor akuntan publik. Hal ini disebabkan dengan persaingan yang tajam akan mengakibatkan solidaritas profesional akuntan publik menurun, sehingga akan mempertahankan klien agar tidak pindah ke kantor akuntan publik lain dengan cara memberi pelayanan yang baik, termasuk menurunkan independensinya atas intervensi klien. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Supriyono (1988) dan Shockley (1981).

#### **5. Ukuran KAP**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik memberi pengaruh yang negatif terhadap independensi kantor akuntan publik. Hal ini disebabkan untuk kantor akuntan publik besar kehilangan satu klien tidak begitu mempengaruhi pendapatannya dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang relatif kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Supriyono (1988) dan Suyatmini (2002).

## 6. *Audit Fee*

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit fee* memberi pengaruh yang negatif terhadap independensi kantor akuntan publik. Hal ini disebabkan : Kantor akuntan yang menerima *audit fee* besar merasa tergantung pada klien, meskipun pendapat klien mungkin tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau mengakibatkan akuntan pemeriksa atau mengakibatkan akuntan pemeriksa tidak dapat melaksanakan norma pemeriksaan akuntan secukupnya. Kantor akuntan yang menerima *audit fee* besar dari seorang klien takut kehilangan klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannya sehingga kantor akuntan tersebut cenderung tidak independen. Kantor akuntan cenderung memberikan "*Countepart fee*" yang besar kepada salah satu atau beberapa pejabat kunci klien yang diaudit, meskipun hal ini dilarang oleh kode etik, sehingga tindakan ini cenderung menimbulkan hubungan yang tidak independen dengan kliennya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Supriyono (1988) dan Suyatmini (2002).

## 7. Hubungan Sosial

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial akuntan publik memberi pengaruh yang negatif terhadap independensi kantor akuntan publik. Hal ini disebabkan dengan masuknya pejabat atau staf kantor akuntan publik yang punya pengaruh dalam kegiatan sosial organisasi non laba sebagai lembaga amal jika tidak

membatasi partisipasinya dan berperan dalam fungsi manajemen akan menurunkan independensinya Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Suyatmini (2002).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial sebagai variabel independen dan independensi sebagai variabel dependen dengan menggunakan *analisis regresi* dari program statistik SPSS, model teoritis dikembangkan dalam kedelapan variabel yang diuji.

Independensi merupakan aspek yang unik dan penting dari profesi akuntan publik, karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi penilaian (akreditasi) atas laporan keuangan. Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan juga tidak memihak kepentingan siapapun. Sudiby (1993: 67) untuk bersikap independen akuntan publik secara intelektual senantiasa berpikir jujur. Dalam praktek akuntan publik banyak mengalami kesulitan untuk menjaga dan mempertahankan independensinya. Sebagai pihak yang independen akuntan publik harus berjuang untuk menghilangkan anggapan bahwa akuntan publik bekerja menurut keinginan klien. Diantaranya penelitian yang dilakukan Levin (1976) meneliti tiga faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi (1) ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa lain selain jasa audit, (3) lamanya hubungan audit dengan klien. Shockly (1981) meneliti empat faktor yang

mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu (1) pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, (2) persaingan antar kantor akuntan publik, (3) ukurnya kantor akuntan publik, (4) lamanya hubungan audit. Supriyono yang mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi : (1) ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) persaingan antar kantor akuntan publik, (3) pemberian jasa lain selain jasa audit, (4) lamanya penugasan audit, (5) besarnya akuntan publik, (6) besarnya *fee audit*. Hasil penelitian Schulte (1965), Hartley dan Ross (1972), serta Goldman dan Berlev (1974) menunjukkan bahwa pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien cenderung meningkatkan kehilangan independensi akuntan publik. Demikian untuk faktor lamanya hubungan audit dengan klien hasilnya juga betentangan, hal ini juga dilihat dari hasil penelitian Lavin (1976) dengan responden para pemakai laporan keuangan pada umumnya berpendapat bahwa faktor ini mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, sedang penelitian Shockly (1980) menunjukkan bahwa faktor lamanya hubungan audit dengan klien tidak signifikan dalam mempengaruhi independensi.

Dari latar belakang dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap independensi akuntan publik merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai arti yang besar pada akuntan publik itu sendiri, serta hasil dari penelitian terdahulu yang masih berbeda-beda hasilnya mendasari timbulnya permasalahan dalam penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi independensi akuntan publik.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemakai jasa audit, pemakai jasa audit dibatasi pada Direktur Utama atau Direktur Keuangan perusahaan menengah dan kecil di Indonesia yang laporan keuangannya tahun buku per 31 Desember 2001 dan per desember 2002 telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Dalam penelitian ini ditentukan jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 100 responden. Jika tingkat *response rate* yang diharapkan adalah 20%, maka jumlah angket yang dikirimkan keresponden sebanyak 500 angket. Analisis data dengan menggunakan komputer statistik SPSS 10.0.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial mempunyai pengaruh terhadap independensi.

## 5.2 Kesimpulan Atas Setiap Hipotesis

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari tujuh hipotesis yang telah diuji menggunakan analisis regresi berganda, dengan menggunakan program statistik SPSS. Adapun masing-masing kesimpulan dari hipotesis tersebut sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama  $H_1$  : Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.
2. Hipotesis Kedua  $H_2$  : Pemberian jasa lain selain audit berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.
3. Hipotesis Ketiga  $H_3$  : Lamanya hubungan audit dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.

4. Hipotesis Ketiga  $H_4$  : Persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.
5. Hipotesis Ketiga  $H_5$  : Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.
6. Hipotesis Ketiga  $H_6$  : Besarnya *audit fee* berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.
7. Hipotesis Pertama  $H_7$  : Adanya hubungan sosial dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.
8. Hipotesis Keempat  $H_8$  : Ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan *audit fee* dan hubungan sosial secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik, diterima.

### 5.3. Kesimpulan Mengenai Masalah Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk melakukan pengujian terhadap masalah penelitian. Dengan diterimanya hipotesis yang diajukan dari hasil analisis dan pembahasan atas permasalahan yang dikembangkan diperoleh dukungan yang signifikan yang memperkuat konsep bahwa, ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP, *audit fee* dan hubungan sosial terhadap independensi. Dengan demikian dari hasil penelitian ini mendapat justifikasi dari hasil analisis. Berdasarkan hal tersebut maka dikembangkan beberapa pernyataan yang didukung bukti empirik sebagai berikut :

- Semakin tinggi ikatan keuangan maka akan mempunyai tingkat independensi yang rendah. Sebaliknya jika ikatan keuangan semakin rendah maka independensi yang tinggi.
- Semakin tinggi pemberian jasa lain selain audit maka akan mempunyai tingkat independensi yang rendah.
- Semakin lamanya hubungan audit dengan klien, maka akan mempunyai tingkat independensi yang rendah. Sebaliknya hubungan audit yang pendek akan membuat tingkat independensi yang tinggi.
- Semakin tinggi persaingan antar KAP, maka akan mempunyai tingkat independensi yang rendah. Sebaliknya persaingan antar KAP yang kurang akan membuat tingkat independensi yang tinggi.
- Semakin besar ukuran KAP, maka akan mempunyai tingkat independensi yang rendah. Sebaliknya ukuran KAP yang kecil akan membuat independensi yang tinggi.
- Semakin besar *audit fee*, maka akan mempunyai tingkat independensi yang rendah. Sebaliknya *audit fee* yang kecil akan membuat independensi yang tinggi.
- Semakin tinggi hubungan sosial, maka akan mempunyai tingkat independensi yang rendah. Sebaliknya hubungan sosial yang rendah akan membuat independensi yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP, *audit fee* dan hubungan sosial

#### 5. 4. Implikasi Menejerial

Penelitian ini berhasil memperoleh bukti empiris bahwa, ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP, *audit fee* dan hubungan sosial terhadap independensi. Dengan demikian dapat diajukan implikasi manajerial untuk meningkatkan independensi kantor akuntan publik sebagai berikut :

1. Penerapan *Code of Profesional Ethics (Rule 101-Independence)* yang benar-benar profesional. Untuk langkah ini dapat ditempuh : Kantor akuntan publik harus membuat daftar terhadap kantor akuntan publik juga anggota yang berhubungan dengan kepemilikan saham, investor, hutang piutang, eksekutor, penjaminan emisi dan lain-lain yang berhubungan dengan ikatan keuangan dan usaha. Daftar ini digunakan untuk menentukan pelaksana auditor dan penentuan klien.
2. Untuk pemberian jasa lain dilakukan oleh divisi tersendiri yang terpisah.
3. Untuk mengurangi hubungan yang terlalu erat dengan klien pelaksana audit dilakukan secara bergantian.
4. Dilarang menerima *fee* selain yang ditentukan dalam kontrak, menerima *fee* bersyarat atau menerima *fee* yang terlalu besar.

5. Akuntan publik yang menjadi anggota yayasan-yayasan sosial dilarang memeriksa yayasan tersebut.

### **5.5 Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan dari model yang disusun, barangkali akan menghasilkan penelitian yang lebih baik jika model lebih dikembangkan lagi dengan menambah beberapa variabel baru serta kemungkinan terjadi bias karena adanya persepsi individu yang berbeda-beda.

### **5.6. Saran**

Dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai ikatan keuangan, jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP, *audit fee* dan hubungan sosial terhadap independensi. perlu untuk dikembangkan model penelitian dengan menambah variabel kompetensi kantor akuntan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Publik Accountants (AICPA), 1989, *Codification of statements on Auditing Standards*, New York : American of Publik Accountants.
- Damador N. Gujarati, 1995 *Basic Econometrics* Third Edition, McGraw-Hill, Inc New York.
- Djarwanto Ps dan Pangestu S, 1993, *Statistik Induktif*, Yogyakarta : BPFE
- Firth M, 1986, *Perception of Auditor Independence and Official Ethical Guideliness* "The counting Review".
- Freser, David J, and Maxwell E. A, 1981, Stetters, *Sistems Based Audits*, Second Edition, Australia: Prentice-Hall Australia Pty. Ltd.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar professional Akuntan Publik*, Salemba Empat Jakarta
- Imam Ghozali, 2002, *Standar Aplikasi Analisis Multivariate*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kell, Walter G. William C.B, 1992, *Modern Auditing*, sst ed. New York : John Willey and Sna Inc.
- Lavin, D. (1976), Perception of the Independence of the Auditor, *The Accounting Review*.
- Meiggs W.A, at al, 1982, *Principles of Auditing*, Homewood, Illionis, Richard D. Lewis Inc.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998, *Auditing*, Penerbit Salemba empat, Jakarta
- Nadirsyah, 1993. *Persepsi Pemakai Informasi Akuntansi, Akuntan dan Masyarakat Umum terhadap Independensi Akuntan Publik*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta, BPFE.

- Shockly, 1981, Perception of independence an Empirical Analisis, *The Accounting Review*.
- Sudibyo S, 1993, *Tinjauan dan Saran-saran Mengenai Buku Pemeriksaan Akuntan*, Yogyakarta : BPFE.
- Supriyono, 1985, *Pemeriksaan Akluntan: Faktor-faktor yang mempengaruhi Idependensi Penampilan Akuntan Publik*, Suatu hasil penelitian Empiris di Indonesia, Yogyakarta : BPFE.
- Suyatmini, 2002, Studi Empiris Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik, *Penelitian untuk Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Taylor DH, And William G, 1999, *Auditing Concept and Procedures*, Singapore, John W